

Katalog: 4102004.3273



# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA BANDUNG 2021



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA BANDUNG**





# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA BANDUNG 2021



# **INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA BANDUNG 2021**

ISSN	: 2797-3646
Katalog BPS	: 4102004.3273
Nomor Publikasi	: 3273.2006
Ukuran Buku	: B5 (17,6 x 25 cm)
Jumlah Halaman	: ix + 72 halaman
Naskah	: Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Ilustrasi Sampul	: Jalan Ciumbuleuit-Cidadap Kota Bandung (koleksi pribadi)
Diterbitkan oleh	: @Badan Pusat Statistik Kota Bandung
Dicetak oleh	: Badan Pusat Statistik Kota Bandung

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kota Bandung

# **INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA BANDUNG 2021**

Tim Penyusun

Pengarah : Aris Budiyanto, S.ST, M.Si

Penanggung Jawab : Dra. Sri Sundari, MM

Naskah : Riza Patwarani, S.ST

Pengolah Data : Riza Patwarani, S.ST

Gambar Kulit, Desain dan *Layout* : Riza Patwarani, S.ST

Penyunting : Dra. Sri Sundari, MM

<https://bandungkota.bps.go.id>



# KATA PENGANTAR

Puji syukur atas segala karunia-Nya sehingga publikasi Indikator Statistik Kesejahteraan Tahun 2021 Kota Bandung berhasil disusun. Publikasi ini merupakan publikasi tahunan yang kami susun guna menyajikan perkembangan kesejahteraan rakyat Kota Bandung. Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan dengan data yang tersedia dan terukur. Adapun sumber data untuk publikasi ini yaitu Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2019-2020, Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2020 dan Publikasi Proyeksi Penduduk 2010-2020 Provinsi Jawa Barat.

Publikasi ini mencakup indikator kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan, taraf dan pola konsumsi serta indikator sosial lainnya di Kota Bandung.

Kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak kami harapkan untuk penyempurnaan penerbitan mendatang. Semoga publikasi ini mampu memenuhi tuntutan kebutuhan data statistik bagi instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi, maupun masyarakat luas. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi berbagai pihak sehingga publikasi ini dapat terbit tepat waktu.

Bandung, Desember 2021  
Kepala BPS Kota Bandung,

**Aris Budiyanto**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR GRAFIK .....	viii
DAFTAR TABEL .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Ruang Lingkup.....	2
1.2 Sistematika.....	2
1.3 Sumber Data .....	2
1.4 Konsep dan Definisi.....	3
BAB II KEPENDUDUKAN .....	9
2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk.....	10
2.2. Sebaran dan kepadatan penduduk .....	12
2.3. Rasio Jenis Kelamin dan Angka Beban Ketergantungan .....	13
2.4. Rata-rata Usia Perkawinan Pertama .....	16
2.5 Penggunaan Alat/Cara KB .....	18
BAB III KESEHATAN .....	20
3.1. Derajat dan Status Kesehatan .....	21
3.2. Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan .....	25
3.3. Kesehatan Ibu dan Balita .....	27
BAB IV PENDIDIKAN .....	31
4.1. Rata-rata Lama Sekolah .....	32
4.2. Partisipasi Pendidikan .....	37
4.3. Tingkat Pendidikan.....	39
BAB V KETENAGAKERJAAN .....	43
5.1. Angkatan Kerja dan Pengangguran .....	44
5.2. Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan.....	48

## Daftar Isi

5.3.	Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan.....	50
5.4.	Sektor Formal dan Sektor Informal .....	54
Bab VI	PERUMAHAN .....	56
6.1.	Kualitas Rumah Tinggal .....	57
6.2.	Fasilitas Rumah Tinggal .....	58
6.3.	Status Kepemilikan Rumah Tinggal .....	60
BAB VII	TARAF DAN POLA KONSUMSI .....	62
7.1.	Pengeluaran Rumah Tangga.....	62
7.2.	Konsumsi Energi dan Protein .....	68
BAB VIII	SOSIAL LAINNYA .....	72
8.1	Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	72
8.2	Perlindungan Sosial .....	74

## DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 1 JUMLAH DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK KOTA BANDUNG, 2000-2020 (PERSEN)	11
GRAFIK 2. KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KECAMATAN DI KOTA BANDUNG, 2020 (JIWA/KM <sup>2</sup> )	13
GRAFIK 3 RASIO JENIS KELAMIN KOTA BANDUNG, 2010-2020 (PERSEN)	14
GRAFIK 4. UMUR HARAPAN HIDUP DI KOTA BANDUNG DAN JAWA BARAT,	21
GRAFIK 5. PERSENTASE PENDUDUK YANG MENDERITA SAKIT SEBULAN YANG LALU MENURUT JENIS KELAMIN DI KOTA BANDUNG, 2018-2020 (PERSEN)	23
GRAFIK 6. PERSENTASE PENDUDUK YANG MENGALAMI KELUHAN KESEHATAN DAN BEROBAT JALAN DI KOTA BANDUNG 2020 (PERSEN)	26
GRAFIK 7. RATA-RATA LAMA SEKOLAH, KOTA BANDUNG 2018-2020 (TAHUN)	35
GRAFIK 8. ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH DI KOTA BANDUNG DAN JAWA BARAT,	36
GRAFIK 9. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) MENURUT JENIS KELAMIN DI KOTA BANDUNG, 2018-2020 (PERSEN)	46
GRAFIK 10. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) MENURUT JENIS KELAMIN DI KOTA BANDUNG 2018-2020	47
GRAFIK 11. PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG TERMASUK PENGANGGURAN TERBUKA MENURUT PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN DI KOTA BANDUNG 2020 (PERSEN)	48
GRAFIK 12. PERSENTASE PENDUDUK 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA SEMINGGU YANG LALU MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA DI KOTA BANDUNG 2020 (PERSEN)	50
GRAFIK 13. PERSENTASE PENDUDUK 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT SATUS PEKERJAAN UTAMA DI KOTA BANDUNG, 2018-2020 (PERSEN)	52
GRAFIK 14. PENDUDUK 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT STATUS KEGIATAN FORMAL DAN INFORMAL DI KOTA BANDUNG 2018-2020 (PERSEN)	55
GRAFIK 16. RATA-RATA KONSUMSI KALORI (KKAL) DAN PROTEIN (GRAM) PER KAPITA SEHARI DI KOTA BANDUNG, 2018-2020	69
GRAFIK 17. RATA-RATA KONSUMSI KALORI PER KAPITA SEHARI MENURUT KELOMPOK PENGELUARAN DI KOTA BANDUNG, 2020 (KKAL)	70
GRAFIK 18. RATA-RATA KONSUMSI PROTEIN PER KAPITA SEHARI DI KOTA BANDUNG, 2020 (GRAM)	71

## DAFTAR TABEL

TABEL 1. JUMLAH PENDUDUK KOTA BANDUNG, 2000-2020 (JIWA) .....	10
TABEL 2. ANGKA BEBAN KETERGANTUNGAN KOTA BANDUNG, 2010-2020 (PERSEN).....	15
TABEL 3. PERSENTASE PEREMPUAN YANG PERNAH KAWIN DI KOTA BANDUNG, 2020 (PERSEN) ...	17
TABEL 4 PERSENTASE PEREMPUAN PERNAH KAWIN BERUMUR 15-49 TAHUN MENURUT STATUS PENGGUNAAN ALAT/CARA KB DI KOTA BANDUNG, 2020 (PERSEN).....	19
TABEL 5. ANGKA KESAKITAN BERDASARKAN KELOMPOK PENGELUARAN DI KOTA BANDUNG 2018-2020 .....	24
TABEL 6. PERSENTASE PEREMPUAN UMUR 15-49 TAHUN YANG PERNAH MELAHIRKAN DALAM 2 TAHUN TERAKHIR PENOLONG PROSES KELAHIRAN TERAKHIR DI KOTA BANDUNG, 2018 – 2020 (PERSEN) .....	28
TABEL 7. PERSENTASE PEREMPUAN BERUMUR 15-49 TAHUN YANG PERNAH KAWIN YANG PERNAH MELAHIRKAN DALAM DUA TAHUN TERAKHIR MENURUT TEMPAT MELAHIRKAN ANAK LAHIR HIDUP YANG TERAKHIR DI KOTA BANDUNG, 2018-2020 (PERSEN) .....	29
TABEL 8. ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH (EYS) DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH (MYS) .....	33
TABEL 9. ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH (EYS) DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH (MYS) (TAHUN), KOTA BANDUNG 2018 - 2020 .....	34
TABEL 10. PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 7-24 TAHUN KE ATAS MENURUT KARAKTERISTIK DAN STATUS PENDIDIKAN, KOTA BANDUNG 2020 .....	37
TABEL 11. PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERTINGGI, KOTA BANDUNG 2020 (PERSEN) .....	40
TABEL 12. PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS MENURUT IJAZAH TERTINGGI YANG DIMILIKI DAN KELOMPOK PENGELUARAN, KOTA BANDUNG 2020 (PERSEN).....	41
TABEL 13. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) KOTA BANDUNG, 2018-2020 (PERSEN).....	45
TABEL 14. RUMAH TANGGA MENURUT BEBERAPA INDIKATOR KUALITAS PERUMAHAN DI KOTA BANDUNG 2019 -2020 (PERSEN) .....	57
TABEL 15. PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT BEBERAPA FASILITAS PERUMAHAN DI KOTA BANDUNG 2018-2020 (PERSEN) .....	59
TABEL 16. RUMAH TANGGA MENURUT STATUS KEPEMILIKAN RUMAH TANGGA DI KOTA BANDUNG 2019-2020 (PERSEN) .....	61
TABEL 17. RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA PER BULAN MENURUT JENIS PENGELUARAN DI KOTA BANDUNG, 2018-2020 .....	63
TABEL 18 RATA-RATA PERSENTASE PENGELUARAN MAKANAN PER KAPITA PER BULAN .....	66
TABEL 19. RATA-RATA PENGELUARAN NON MAKANAN PER KAPITA SEBULAN MENURUT KELOMPOK PENGELUARAN DI KOTA BANDUNG, 2020 (RUPIAH) .....	68
TABEL 20 PERSENTASE ANGGOTA RUMAH TANGGA 5 TAHUN KE ATAS YANG MENGAKSES INTERNET 3 BULAN TERAKHIR MENURUT KARAKTERISTIK DI KOTA BANDUNG, 2019-2020.....	73
TABEL 21. PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT JENIS PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL YANG DITERIMA DI KOTA BANDUNG, 2019-2020 (PERSEN) .....	75





## BAB I PENDAHULUAN

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan perwujudan pelaksanaan pencapaian tujuan yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan dasar ini dalam Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 alinea keempat. Untuk itu, pemerintah melaksanakan pembangunan nasional yang dituangkan dalam rencana pembangunan yang pada akhirnya diimplementasikan dalam program-program pembangunan.

Sebagai bagian dalam masyarakat internasional, Indonesia telah menyetujui untuk mengadopsi standar dan norma yang berlaku secara internasional. Pendekatan terpadu sasaran-sasaran pembangunan yang lebih konkret, terukur dan kuantitatif secara universal tercantum dalam tujuan pembangunan yang tercetus dalam SDGs (*Sustainable development Goals*). SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 target yang merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (hingga tahun 2030) guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh Negara (universal), sehingga seluruh Negara tanpa kecuali Negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target SDGs.

Data dan informasi mengenai keadaan masyarakat setiap tahunnya merupakan hal penting dalam pembangunan. Salah satu informasi yang terkait dengan pembangunan yaitu gambaran keadaan masyarakat mengenai kehidupan sosial ekonominya. Ketersediaan indikator sosial dari suatu daerah sangat diperlukan untuk mengarahkan dan mengevaluasi pembangunan agar tepat sasaran dan efisien.

Publikasi atau gambaran mengenai kesejahteraan masyarakat ini diharapkan mampu memberikan gambaran sejauh mana perkembangan kesejahteraan penduduk yang telah dicapai, sebagai hasil dari pembangunan yang telah dilaksanakan. Isi Indikator Kesejahteraan Rakyat ini masih bersifat makro mengingat dimensi cakupan kesejahteraan



yang sedemikian luasnya. Namun demikian, publikasi ini diharapkan banyak membantu dalam analisis sosial ekonomi kesejahteraan penduduk di Kota Bandung.

### 1.1 Ruang Lingkup

Tingkat kesejahteraan rakyat meliputi kesejahteraan materil dan non materil. Kesejahteraan materil meliputi pendapatan, kepemilikan harta benda, termasuk keadaan fisik rumah tempat tinggal bersama fasilitasnya. Sedangkan kesejahteraan non materil meliputi keadaan pendidikan, kesehatan, kebersihan dan lain lain.

Pembahasan dalam publikasi ini, tidak saja yang bersifat materil tetapi juga yang bersifat non materil. Karena tidak semua aspek non materil dapat diukur, sehingga yang dibahas hanya masalah sosial dan demografi yang dapat diukur dan dianggap penting sebagai komponen yang dominan berpengaruh dalam menentukan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat.

### 1.2 Sistematika

Indikator kesejahteraan Kota Bandung tahun 2020 ini terdiri dari 7 kelompok yakni Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Perumahan, Taraf dan Pola konsumsi , serta sosial lainnya yang digambarkan dalam tabel dan gambar/grafik beserta uraiannya yang disajikan secara terpisah dan dalam bab masing masing.

### 1.3 Sumber Data

Sumber data yang disajikan dalam pembuatan publikasi Indikator Statistik Kesejahteraan Rakyat 2021 ini yaitu data sekunder hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2019 dan 2020 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2020 yang dikumpulkan secara primer oleh petugas BPS.





## 1.4 Konsep dan Definisi

### **Rumah Tangga**

Seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama dan makan satu dapur. Yang dimaksud makan satu dapur adalah jika pengurusan makan sehari harinya dikelola menjadi satu.

### **Kepala Rumah Tangga**

Seorang dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari hari rumah tangga tersebut atau orang yang dianggap/ditunjuk oleh anggota rumah tangga bersangkutan sebagai kepala rumah tangga.

### **Anggota Rumah Tangga**

Semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah tangga waktu pencacahan maupun sementara tidak ada. Anggota rumah tangga yang telah bepergian 6 bulan atau lebih, dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah/akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih ,dianggap bukan sebagai anggota rumah tangga. Orang yang telah tinggal di rumah tangga 6 bulan atau lebih atau yang tinggal di rumah tangga kurang 6 bulan tetapi berniat pindah/bertempat tinggal di rumah tangga tersebut 6 bulan atau lebih dianggap sebagai anggota rumah tangga.

### **Sekolah**

Kegiatan bersekolah di sekolah formal (negeri dan swasta) baik pada pendidikan dasar, pendidikan menengah atau pendidikan tinggi.

### **Tidak/belum pernah sekolah**

Mereka yang tidak mau atau belum pernah sekolah. Termasuk mereka yang tamat/belum tamat Taman Kanak kanak yang tidak melanjutkan ke SD.

### **Masih bersekolah**

Mereka yang sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi.



### **Tidak sekolah lagi**

Mereka yang pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah atau tinggi, tetapi pada saat pencacahan tidak sekolah lagi.

### **Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki (ditamatkan)**

Jenjang pendidikan yang pernah diduduki (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diduduki oleh seseorang yang masih sekolah.

### **Angka Partisipasi Sekolah**

Proporsi dari seluruh penduduk dari berbagai kelompok umur tertentu ( 7-12, 13-15, 16-18, dan 19-24) yang masih duduk di bangku sekolah.

### **Keluhan Kesehatan**

Keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau gangguan kejiwaan, baik karena karena penyakit akut, penyakit kronis, kecelakaan, criminal atau hal lain.

### **Imunisasi**

Memasukkan kuman penyakit yang sudah dimatikan kedalam tubuh anak balita dengan cara suntik atau minum dengan maksud agar terjadi kekebalan terhadap jenis penyakit tertentu pada tubuh.

### **Penduduk Usia Kerja**

Penduduk yang berusia 15 tahun keatas.

### **Angkatan Kerja**

Penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan atau mencari pekerjaan.

### **Penduduk Bukan Angkatan Kerja**

Penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.





## **Bekerja**

Kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit satu jam dalam seminggu. Bekerja dalam satu jam tersebut harus dilakukan berturut turut tidak terputus.

## **Jenis Pekerjaan**

Macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang.

## **Lapangan Pekerjaan**

Bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha /perusahaan/ instansi tempat seorang bekerja.

## **Status Pekerjaan**

Jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaannya.

## **Pekerjaan Utama**

Pekerjaan yang menggunakan waktu terbanyak pada referensi waktu survey seminggu yang lalu dan bukan biasanya (*usually*)

## **Penganggur**

Mereka yang termasuk dalam angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi aktif mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau yang sudah dapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

## **Mencari Pekerjaan**

Kegiatan dari mereka yang berusaha mendapatkan pekerjaan.

## **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas.

## **Setengah Penganggur**

Mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Setengah penganggur terdiri dari :

## Pendahuluan



- Setengah penganggur terbuka adalah mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.
- Setengah penganggur sukarela adalah mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (sebagian pihak menyebutkan sebagai pekerja paruh waktu/*part time worker*)

### Jumlah jam kerja seluruh pekerjaan

Jumlah jam kerja yang dilakukan oleh seseorang (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal hal diluar pekerjaan) selama seminggu yang lalu.

### Luas Lantai

Luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari hari. Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari hari tidak dimasukkan dalam perhitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, jemuran, dan warung (sebatas atap).

### Dinding

Sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan rumah tangga atau bangunan lain.

### Atap

Penutup bagian atas suatu bangunan sehingga orang yang mendiami dibawahnya terlindung dari teriknya matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.

### Pengeluaran rata rata per kapita

Rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga sebulan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi dua yaitu konsumsi makanan dan bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah





## *Pendahuluan*

tangga saja, tidak termasuk konsumsi pengeluaran untuk keperluan usaha rumah tangga atau yang diberikan kepada pihak lain. Pengeluaran untuk konsumsi makanan ditanyakan selama seminggu yang lalu, sedangkan pengeluaran untuk bukan makanan setahun yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata rata sebulan.

<https://bandungkota.bps.go.id>



<https://bandungkota.bps.go.id>





## **BAB II KEPENDUDUKAN**

Penduduk merupakan dasar dan tujuan pelaksanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan didasarkan dengan kondisi demografi yang ada. Dengan demikian program pembangunan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan. Sebagaimana disebutkan dalam Rencana Jangka Panjang dan Menengah Kota Bandung Tahun 2018-2023, penduduk adalah titik sentral dalam pembangunan karena peran penduduk sejatinya adalah sebagai subjek dan objek dari pembangunan.

Kondisi demografi di sebuah wilayah akan mempengaruhi bagaimana dan sejauh mana pembangunan tersebut dapat dilakukan. Jumlah penduduk merupakan salah satu modal pembangunan karena dengannya pembangunan dapat bergerak. Kondisi demografi lainnya seperti komposisi penduduk, distribusi penduduk, rasio jenis kelamin dan sebagainya akan menentukan program dan kebijakan dasar yang harus diambil dalam proses pembangunan.

Dalam penyusunan strategi dan kebijakan pembangunan tersebut, diperlukan data kependudukan yang akurat dan terkini. Pembangunan tanpa didasari oleh data membutuhkan biaya yang lebih besar. Keberadaan data kependudukan sangat penting supaya arah pembangunan menjadi jelas dan terarah.

Penduduk yang berkualitas adalah penduduk yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, ditandai dengan kondisi ideal dimana jumlah penduduknya terkendali, terpenuhinya pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan dengan layak, memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas.

Informasi kependudukan merupakan data strategis yang sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan. Pertumbuhan dan sebaran penduduk serta urbanisasi dan migrasi penduduk di Kota Bandung menjadi permasalahan utama. Dengan adanya informasi strategis ini, diharapkan Pemerintah dapat membuat kebijakan dan program



yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hidup masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Parameter kependudukan yang akan dibahas pada bab ini adalah jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, sex ratio, persebaran dan kepadatan penduduk, beban ketergantungan, rata-rata usia perkawinan pertama, dan penggunaan alat/cara KB.

### 2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk yang dilakukan oleh BPS, penduduk jumlah penduduk Kota Bandung pada tahun 2020 adalah sebesar 2.444.160 jiwa, terdiri dari 1.231.116 penduduk laki-laki dan 1.213.044 penduduk perempuan. Penduduk Kota Bandung mencakup 5,06 persen dari jumlah penduduk Jawa Barat. Jumlah penduduk Kota Bandung adalah jumlah penduduk kedelapan terbesar di Jawa Barat. Sedangkan di wilayah Bandung Raya, Kota Bandung merupakan kota/kabupaten dengan penduduk kedua terbesar setelah Kabupaten Bandung.

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Bandung, 2000-2020 (Jiwa)**

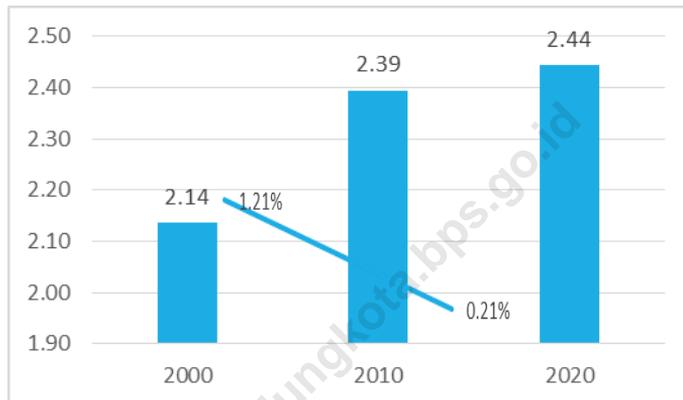
Tahun	Jumlah Penduduk
(1)	(2)
2000	2.136.260
2010	2.394.873
2020	2.444.160

*Sumber : Hasil Sensus Penduduk 2000, 2010, dan 2020, BPS*



Jumlah penduduk Kota Bandung meningkat dalam dua dekade terakhir. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang diperoleh dari Sensus Penduduk tahun 2010 tahun 2010 yang sebesar 2.394.873 jiwa maka terdapat penambahan penduduk sebesar 12,11 persen. Laju pertumbuhan penduduk Kota Bandung dapat dilihat di Grafik 1.

**Grafik 1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bandung, 2000-2020 (persen)**



Sumber : Sensus Penduduk BPS Kota Bandung 2010-2020, BPS

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kota Bandung menunjukkan tren yang menurun dalam dua dekade terakhir. Pada tahun 2010, laju pertumbuhan penduduk hasil sensus penduduk tahun 2010 dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 2000 terlihat meningkat sebesar 1,21 persen per tahun. Pada dekade berikutnya, di tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk per tahun hanya sebesar 0,21 persen. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam hal pengendalian pertumbuhan penduduk telah menunjukkan adanya keberhasilan. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun Kota Bandung tahun 2020 berada diatas laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat, berada di bawah laju pertumbuhan penduduk per tahun Jawa Barat yang sebesar 1,11 persen per tahun.



## 2.2. Sebaran dan kepadatan penduduk

Secara administratif, Kota Bandung terbagi ke dalam 30 kecamatan dan 151 kelurahan. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kota Bandung adalah Kecamatan Babakan Ciparay, yaitu mencakup 5,83 persen penduduk Kota Bandung. Empat kecamatan lainnya dengan jumlah penduduk terbesar secara berurut adalah Bandung Kulon, Kecamatan Kiara Condong, Kecamatan Bojongloa Kaler, dan Kecamatan Batu Nunggal. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah kecamatan Cinambo di mana penduduknya mencakup 1,04 persen penduduk Kota Bandung.

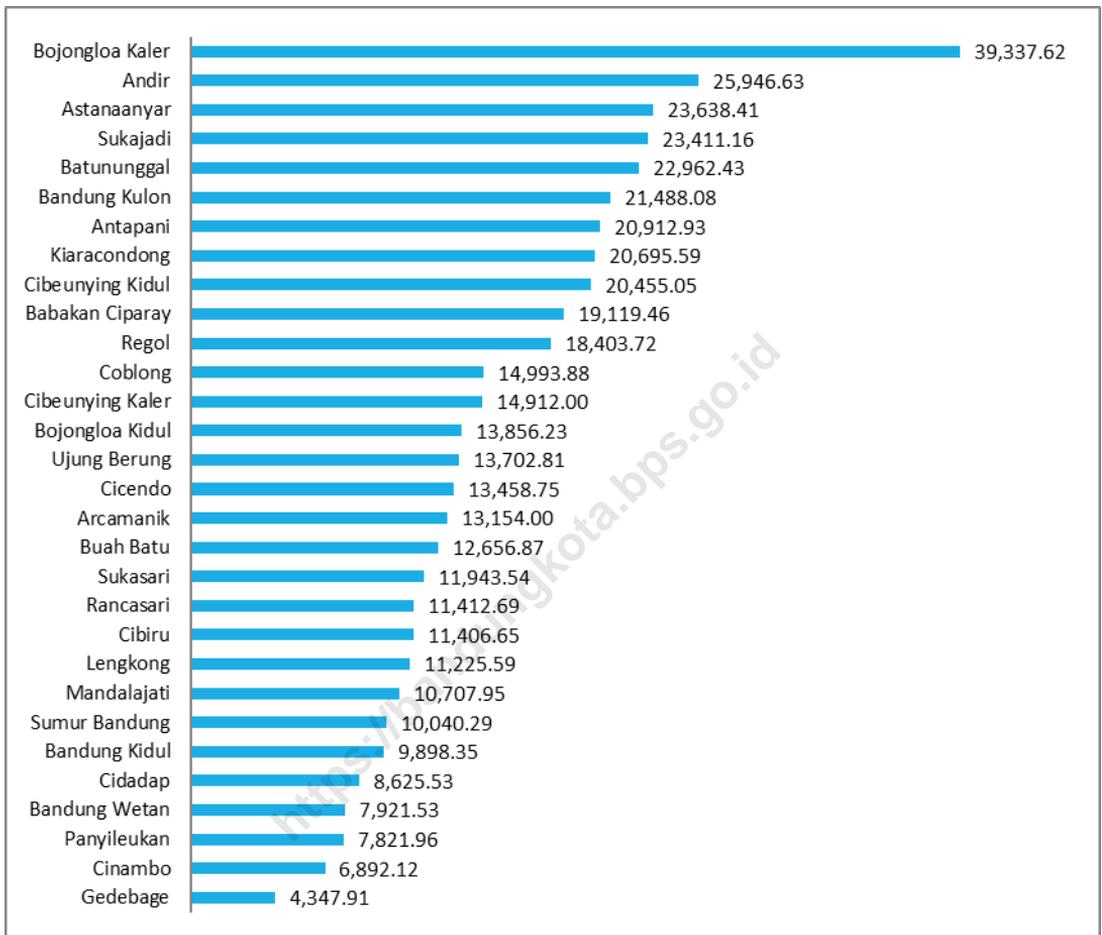
Kepadatan penduduk Kota Bandung tahun 2020 mencapai 14.608,57 jiwa per km<sup>2</sup>. Kecamatan Bojongloa Kaler merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 39.337,62 penduduk per km<sup>2</sup>. Empat kecamatan lain dengan kepadatan penduduk tertinggi secara berurutan adalah Kecamatan Andir, Kecamatan Astanaanyar, Kecamatan Sukajadi, dan Kecamatan Bandung Kulon. Ada tujuh kecamatan di Kota Bandung yang memiliki tingkat kepadatan penduduk di bawah 10.000 penduduk per km<sup>2</sup> yaitu Kecamatan Bandung Kidul, Kecamatan Panyileukan, Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Cinambo, Cidadap, dan Kecamatan Gedebage. Kepadatan penduduk terkecil ada di kecamatan Gedebage dengan kepadatan 4.347,34 penduduk per km<sup>2</sup>.

Jumlah penduduk yang menghuni suatu daerah akan turut menentukan program pembangunan. Semakin besar jumlah penduduk yang berada di suatu wilayah maka akan semakin besar pula sarana pendukung yang diperlukan. Dengan luas wilayah yang relatif tidak terlalu besar, daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di Kota Bandung menunjukkan adanya jumlah penduduk yang cukup besar yang tinggal dalam suatu wilayah yang relatif kecil. Kebutuhan sarana perumahan, kesehatan, kebersihan dan sarana umum lainnya di daerah ini akan besar.





Grafik 2. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bandung, 2020 (jiwa/km<sup>2</sup>)



Sumber : Sensus Penduduk BPS Kota Bandung

### 2.3. Rasio Jenis Kelamin dan Angka Beban Ketergantungan

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah. Pada tahun 2020, rasio jenis kelamin Kota Bandung adalah sebesar 101,49 dimana jumlah penduduk laki-laki

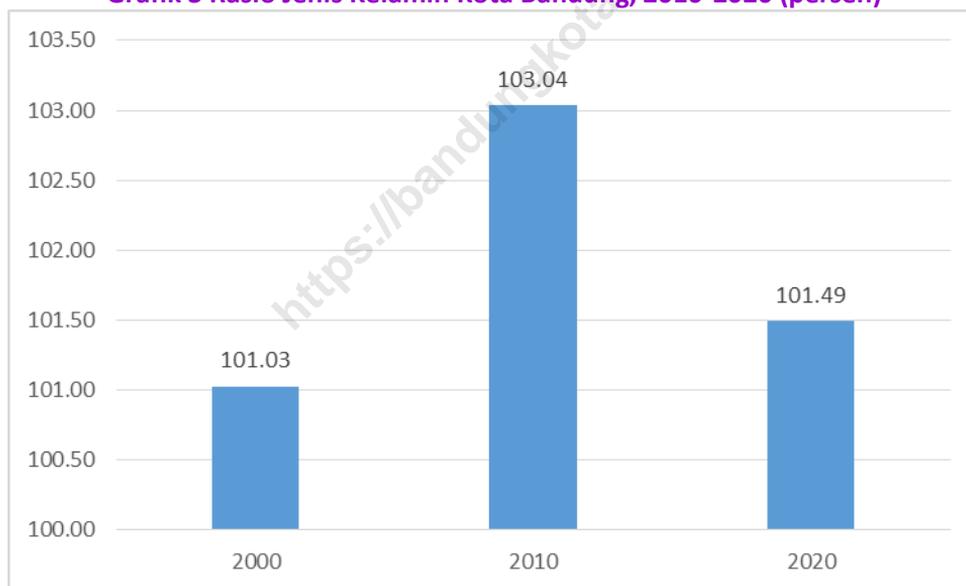
## Kependudukan



sebanyak 1,23 juta dan perempuan sebanyak 1,21 juta jiwa. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki sekitar 18 ribu lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan.

Rasio jenis kelamin sebesar 101,49 menunjukkan bahwa dari setiap 100 perempuan di Kota Bandung, maka terdapat sekitar 101 jiwa penduduk laki-laki. Angka tersebut menurut selama enam tahun terakhir. Dari grafik 3 terlihat bahwa pada tahun 2000 rasio jenis kelamin Kota Bandung adalah 101,03. Pada dekade berikutnya yaitu tahun 2010 rasio jenis kelamin sebesar 103,04 menunjukkan jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan. Pada tahun 2020 rasio jenis kelamin menurun mencapai 101,49. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan semakin lama semakin berimbang.

**Grafik 3 Rasio Jenis Kelamin Kota Bandung, 2010-2020 (persen)**



*Sumber : Sensus Penduduk BPS Kota Bandung 2000-2020, BPS*

Angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif (15-64 tahun) untuk membiayai hidup penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) dan tidak produktif (65 tahun ke atas).



Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) tidak hanya digunakan untuk melihat seberapa besar beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif tetapi juga dijadikan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang.

Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif. Persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif. Angka Beban Ketergantungan Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut.

**Tabel 2. Angka Beban Ketergantungan Kota Bandung, 2010-2020 (persen)**

<b>Kelompok Umur</b>	<b>2010</b>	<b>2020</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
<b>0-14</b>	599.861	558.172
<b>15-64</b>	1.691.902	1.723.660
<b>65+</b>	103.110	162.328
<b>Angka Beban Ketergantungan</b>	41,55	41,80

*Sumber : Sensus Penduduk BPS Kota Bandung, BPS*

Penduduk Kota Bandung di tahun 2010 dan 2020 didominasi oleh penduduk usia produktif. Tahun 2010 terdapat 1,6 juta penduduk usia produktif dan tahun 2020 terdapat 1,7 juta penduduk usia produktif. Dilihat dari angka ketergantungan, terlihat bahwa beban penduduk usia produktif di 2020 meningkat. Pada Tahun 2010 Kota Bandung memiliki angka beban ketergantungan sebesar 41,55 dan naik pada tahun 2020 menjadi 41,80.



Angka ini menunjukkan bahwa pada tahun 2010 dari 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 41 penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Pada tahun 2020, penduduk usia produktif menanggung sekitar 42 penduduk usia tidak produktif. Semakin besar angka beban ketergantungan maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif dan semakin besar pula upaya dan hambatan yang harus dilakukan dan ditangani oleh pemerintah.

Jumlah penduduk usia produktif yang besar merupakan peluang bagi daerahnya. Potensi penduduk usia produktif yang cukup besar dapat dioptimalkan agar dapat menjadi aset untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun sebaliknya, jumlah penduduk produktif yang tinggi mungkin dapat menyebabkan timbulnya beragam permasalahan penduduk seperti tingginya pengangguran, kriminalitas, kemiskinan dan pemukiman kumuh. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk dapat meningkatkan potensi dan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih produktif, cerdas dan berkarakter sehat yang dapat menjadi modal pembangunan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 2.4. Rata-rata Usia Perkawinan Pertama

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1, syarat menikah untuk laki-laki minimal sudah berusia 19 tahun dan untuk perempuan harus sudah berusia 16 tahun. Pasal 6 ayat 2 berbunyi, jika menikah di bawah usia 21 tahun harus disertai dengan ijin kedua atau salah satu orangtua atau yang ditunjuk sebagai wali.

Sedangkan menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama idealnya adalah umur 21 hingga 25 tahun. Rekomendasi BKKBN sesuai dengan hak pendidikan 12 tahun, juga diharapkan ketika menikah sudah memiliki kesiapan psikologis, kesehatan reproduksi serta kemapanaan material dan mencegah meningkatnya pernikahan anak.





Usia perkawinan pertama dapat menjadi salah satu pemicu pertambahan jumlah penduduk, semakin panjang masa reproduksi seorang wanita semakin banyak kemungkinan anak yang bisa dilahirkan. Banyaknya kelahiran yang terjadi pada seorang wanita dapat dipengaruhi oleh masa reproduksinya.

**Tabel 3. Persentase Perempuan Yang Pernah Kawin di Kota Bandung, 2020 (persen)**

Umur	Persentase
(1)	(2)
<= 16	8,81
17 – 18	16,03
19 -20	21,77
21+	53,38
<b>Total</b>	<b>100</b>

*Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat, 2020*

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, sebagian perempuan di Kota Bandung melakukan perkawinan pertama pada umur di atas 21 tahun. Hal ini sejalan dengan persentase pendidikan perempuan di Kota Bandung di mana 53,38 persen berpendidikan SMA ke atas. Dengan demikian secara umum, perempuan Kota Bandung telah memenuhi rekomendasi BKKBN dalam memenuhi usia perkawinan. Selebihnya terbagi ke dalam beberapa kelompok. Sebanyak 21,77 persen perempuan pernah kawin di Kota Bandung kawin pertama di usia 19 – 20 tahun. Terdapat pula perempuan yang melakukan perkawinan pertama pada usia 17 -18 tahun dengan persentase sebesar 16,03 persen. Bahkan masih terdapat perkawinan yang dilakukan di usia perempuan kurang dari 16 tahun sebesar 8,81 persen.

Perkawinan perempuan usia dibawah 16 tahun masih kerap terjadi di Kota Bandung. Perkawinan perempuan dibawah umur masih perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Banyak dampak buruk dari terjadinya pernikahan anak. Selain dampak



psikologis dari seseorang yang belum dewasa dan siap untuk menikah, dapat menyebabkan tingginya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, angka kematian ibu dan anak dapat meningkat seiring terjadinya kehamilan di usia muda dan minimnya pengetahuan dan kesadaran mengenai kesehatan reproduksi.

## **2.5 Penggunaan Alat/Cara KB**

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan penggunaan berbagai macam alat kontrasepsi. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik dan sekaligus dapat meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.

Terdapat berbagai macam jenis alat/cara KB. Menurut masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua kelompok yaitu alat kontrasepsi hormonal dan permanen. Alat kontrasepsi hormonal umumnya mengandung kombinasi progestrin dan estrogen, atau progesteron saja. Alat kontrasepsi yang dapat digunakan dalam bentuk pil KB, suntik KB, implan, *Intra Uterine Device* (IUD), kondom dan lainnya. Biasanya digunakan untuk menunda dan mengatur jarak kehamilan yang memiliki masa kerja bersifat sementara baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan kontrasepsi permanen atau sterilisasi biasanya digunakan untuk perempuan yang tidak lagi menginginkan kehamilan karena faktor kesehatan, usia atau jumlah anak yang telah dilahirkan. Biasanya digunakan alat kontrasepsi seperti tubektomi/MOW, ligasi tuba, implan tuba, dan elektrokoagulasi tuba, sedangkan pada lelaki dapat dilakukan vasektomi/MOP.

Persentase perempuan pernah kawin berumur 15-49 tahun di Kota Bandung berstatus sedang menggunakan alat/cara KB adalah sebesar 53,77 persen dan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan di Kota Bandung telah mengikuti himbuan pemerintah dan merasakan pentingnya untuk mengatur kelahiran.



Sebesar 33,75 persen wanita pernah kawin tidak menggunakan KB. Kondisi perempuan yang berstatus pernah kawin dan tidak menggunakan alat/cara KB dimungkinkan karena berstatus perkawinan cerai, sedang dalam kondisi hamil, sedang berprogram untuk memiliki anak atau pun mengalami keluhan dengan alat KB.

**Tabel 4 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun Menurut Status Penggunaan Alat/Cara KB di Kota Bandung, 2020 (persen)**

Penggunaan Alat/Cara KB	Persentase
(1)	(2)
Pernah Menggunakan	12,49
Sedang Menggunakan	53,76
Tidak Menggunakan	33,75
Jumlah	100

*Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Jawa Barat, 2020*

Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Bandung, terdapat 289.470 pasangan usia subur di Kota Bandung tahun 2020 dengan 288.668 peserta KB aktif. Suntikan merupakan alat KB yang paling banyak digunakan oleh peserta KB di Kota Bandung yaitu sebesar 40,05 persen. Selanjutnya adalah IUD yang digunakan oleh 33,99 persen peserta KB di Kota Bandung. Alat KB ketiga terbanyak yang digunakan oleh peserta KB di Kota Bandung adalah pil yakni digunakan oleh 15,48 persen peserta KB.

Pelaksanaan program KB merupakan sebuah salah satu cara pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk sehingga nantinya dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan penduduk pada umumnya. Program KB mengatur jarak kelahiran yang memungkinkan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta mengurangi kehamilan yang tidak diinginkan. Dengan demikian orang tua dapat lebih mempersiapkan dirinya dalam memiliki anak sehingga diharapkan anak akan tumbuh dalam lingkungan yang lebih berkualitas dan menghasilkan generasi yang sehat, cerdas, tangguh dan berkualitas.



## BAB III KESEHATAN

Kesehatan merupakan salah satu aspek dalam kesejahteraan. Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Menurut Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif dan ekonomis. Kesehatan sangat berkaitan dengan aktifitas manusia. Suatu kegiatan akan lebih berkualitas bila dilakukan dalam kondisi yang sehat.

Aspek kesehatan tercakup pula dalam tujuan ketiga dalam *The 2030 for the Sustainable Development Goals* atau Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Tujuan nomer tiga tersebut adalah menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Dengan demikian negara yang menyepakati SDGs sebagai salah satu tujuan pelaksanaan pembangunan bersepakat bahwa aspek kesehatan memerlukan perhatian dan penanganan yang baik.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, setiap daerah membuat program dan strategi. Dalam RPJMD Kota Bandung tahun 2018-2023 strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah 1) Meningkatkan kualitas lingkungan sehat, 2) Meningkatkan budaya hidup sehat; dan 3) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat



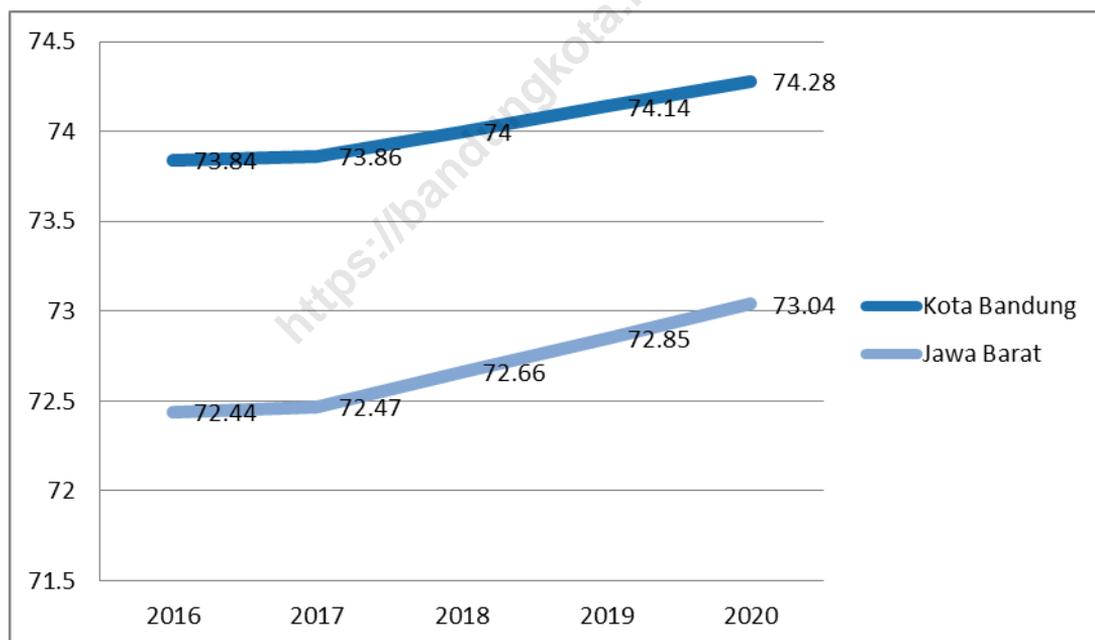


jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

### 3.1. Derajat dan Status Kesehatan

Salah satu parameter untuk mengukur derajat kesehatan suatu wilayah adalah Umur Harapan Hidup (UHH). UHH merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Semakin tinggi UHH berarti semakin rendah angka kematian. UHH digunakan sebagai indikator derajat kesehatan penduduk dan kemampuan pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan, terpenuhinya kecukupan gizi dan kalori penduduk, dan kesehatan lingkungan yang baik.

**Grafik 4. Umur Harapan Hidup di Kota Bandung dan Jawa Barat, 2016-2020 (Tahun)**



Sumber : [jabar.bps.go.id](http://jabar.bps.go.id)

UHH Kota Bandung tahun Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat terlihat meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 UHH di Kota Bandung sebesar 73,84 Tahun. Angka UHH terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2020 angka UHH Kota Bandung



berada dinilai 74,28. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di Kota Bandung memiliki harapan hidup hingga di umur 74 tahun. Kota Bandung juga memiliki UHH yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata UHH di Provinsi Jawa Barat. UHH di Jawa Barat tahun 2020 adalah 73,04 tahun, lebih rendah sekitar 1 tahun dibandingkan dengan UHH di Kota Bandung.

Peningkatan angka usia harapan hidup menunjukkan adanya beberapa peningkatan beberapa pelayanan masyarakat di Kota Bandung. Peningkatan tersebut seperti semakin baik dan semakin mudah pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, serta ketersediaan fasilitas kesehatan yang semakin banyak. Selain itu, peningkatan angka usia harapan hidup juga menunjukkan adanya perubahan pola hidup di masyarakat. Masyarakat menjalani perilaku hidup bersih dan sehat dan semakin baiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

Untuk melihat derajat dan status kesehatan masyarakat di Kota Bandung, tidak hanya melalui usia harapan hidup, melainkan juga melalui bagaimana tingkat morbiditas di masyarakat. Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Tingkat Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan atau keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

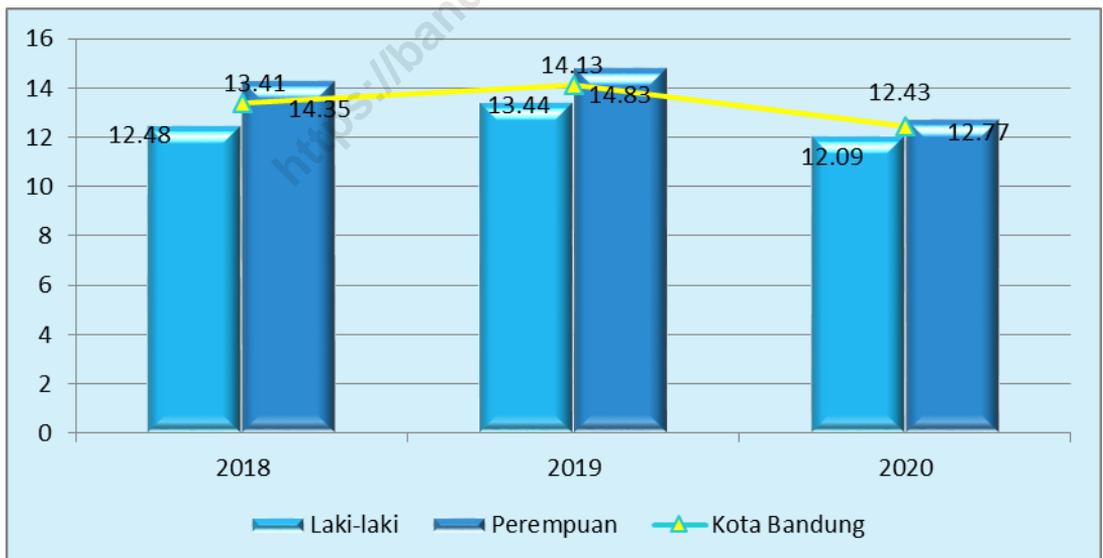
Dalam tiga tahun terakhir, angka kesakitan penduduk di Kota Bandung terlihat menurun. Pada tahun 2019, angka kesakitan penduduk laki-laki sebesar 13,44 dan angka kesakitan penduduk perempuan sebesar 14,83. Terdapat 13,44 persen penduduk laki-laki dan 14,83 persen penduduk perempuan menderita sakit sebulan lalu. Angka tersebut



terlihat menurun di tahun 2020. Pada tahun 2020, angka kesakitan laki-laki sebesar 12,09 persen dan angka kesakitan perempuan sebesar 12,77 persen. Terdapat 12,09 persen penduduk laki-laki dan 12,77 persen penduduk perempuan yang menderita sakit sebulan yang lalu.

Jika dilihat dari kategori jenis kelamin, angka kesakitan atau tingkat morbiditas penduduk laki-laki dan penduduk perempuan selalu berbeda setiap tahunnya. Angka morbiditas perempuan terlihat selalu lebih tinggi dibandingkan dengan angka morbiditas laki-laki. Artinya persentase penduduk perempuan yang sakit lebih banyak dibandingkan dengan persentase penduduk laki-laki. Meskipun berbeda, perbedaan angka kesakitan tersebut tidak terlalu signifikan, hanya sekitar 1-2 poin. Hal ini menunjukkan tidak ada kesenjangan yang signifikan dari kesehatan penduduk laki-laki dan perempuan.

**Grafik 5. Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Sebulan yang Lalu Menurut Jenis Kelamin di Kota Bandung, 2018-2020 (Persen)**



*Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung 2018-2020*

Bila ditinjau dari kelompok pengeluaran penduduk Kota Bandung, tidak terdapat perbedaan yang berarti dari kesakitan yang diderita oleh setiap kelompok



pendapatan yang berarti. Angka kesakitan berdasarkan kelompok pengeluaran dapat dilihat di tabel 5.

**Tabel 5. Angka Kesakitan Berdasarkan kelompok Pengeluaran di Kota Bandung 2018-2020**

Kelompok Pengeluaran	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
40 persen terbawah	14,18	13,05	9,42
40 persen tengah	14,37	15,51	16,06
20 persen atas	9,94	13,52	11,17
Kota Bandung	13,41	14,13	12,43

*Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, 2018-2020*

Pada tahun 2018, angka kesakitan penduduk dengan kelompok pengeluaran 40 persen kebawah sebesar 14,18 persen. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka kesakitan penduduk kelompok pengeluaran 20 persen keatas, yaitu sebesar 9,94 persen. Hal ini menunjukkan di tahun 2018, penduduk dengan pengeluaran lebih rendah 4 persen lebih banyak sakit dibandingkan dengan penduduk yang pengeluarannya lebih tinggi.

Pada tahun 2019, angka kesakitan di Kota Bandung jika dilihat dari kelompok pengeluarannya, tidak ada perbedaan yang signifikan. Pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah, terdapat 13,05 persen penduduk yang menderita sakit sebulan lalu. Pada kelompok pengeluaran 40 persen tengah, terdapat 15,51 penduduk yang sakit sebulan lalu. Pada kelompok pengeluaran yang paling tinggi (20 persen keatas), angka kesakitan sebesar 13,52 persen.

Hal sebaliknya terjadi di tahun 2020. Angka kesakitan penduduk dengan kelompok pengeluaran 40 persen terbawah memiliki tingkat kesakitan 9,42 persen. Sedangkan penduduk dengan kelompok pengeluaran 20 persen diatas justru memiliki tingkat kesakitan sebesar 11,17 persen. Angka kesakitan untuk penduduk pengeluaran 40 persen tengah memiliki nilai paling tinggi yaitu sebesar 16,06 persen. Nilai angka kesakitan





tersebut sekitar 6 persen lebih banyak sakit dibandingkan dengan penduduk yang pengeluarannya lebih rendah.

Angka kesakitan secara umum di Kota Bandung terlihat berfluktuasi. Pada tahun 2018 ke 2019 terlihat ada peningkatan angka kesakitan dari 13,41 persen menjadi 14,13 persen. Angka ini terlihat menurun di tahun 2020 yaitu menjadi sebesar 12,43 persen. Artinya terdapat 12,43 persen penduduk yang menderita sakit sebulan lalu di tahun 2020.

### **3.2. Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan**

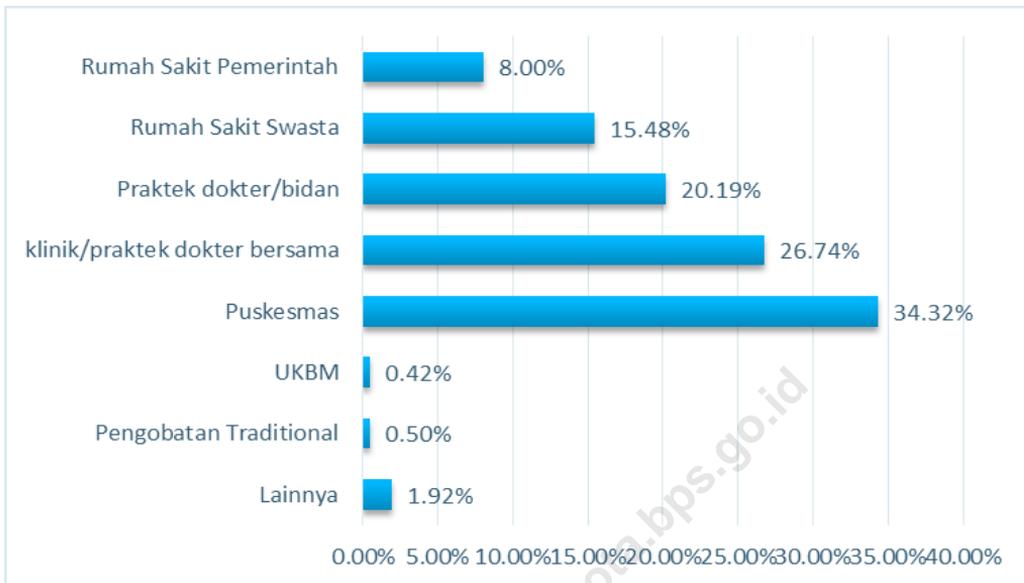
Keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan memegang peranan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Menurut Undang-undang Kesehatan, Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Dari Kota Bandung Dalam Angka 2021, Kota Bandung memiliki sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan, di antaranya 26 rumah sakit, 10 rumah sakit bersalin, 123 poliklinik, 70 puskesmas, 7 puskesmas pembantu, dan 135 apotek. Selain itu terdapat pula posyandu, praktek bidan yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Bandung.

Penduduk yang mengalami keluhan kesehatan akan terbantu mendapat pelayanan kesehatan dengan keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan. Dari data Susenas 2020 diketahui bahwa 34,32 persen penduduk Kota Bandung yang mengalami keluhan kesehatan mengunjungi puskesmas untuk berobat jalan. Klinik atau praktek dokter bersama dikunjungi oleh 26,74 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan. Sedangkan rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta dikunjungi oleh masing-masing 8,0 dan 15,48 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan.



**Grafik 6. Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan di Kota Bandung 2020 (Persen)**



**Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Jawa Barat 2020**

Namun demikian tidak semua penduduk yang mengalami keluhan kesehatan mengunjungi sarana kesehatan untuk berobat jalan. Dari hasil Susenas 2020, hanya 47,70 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan di fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Di daerah perkotaan di Jawa Barat, terdapat 34,88 persen penduduk yang mengalami keluhan tapi merasa tidak perlu untuk berobat sementara di pedesaan terdapat 34,8 penduduk yang merasa tidak perlu berobat.

Ada beberapa alasan penduduk yang mengalami keluhan kesehatan memilih tidak melakukan berobat jalan. Alasan paling utama yaitu penduduk mengobati sendiri sebanyak 59,45 persen. Selain itu, sebanyak 36,04 persen penduduk merasa tidak perlu berobat jalan. Terdapat 1,57 persen penduduk di Jawa Barat yang mengalami keluhan kesehatan namun tidak berobat jalan disebabkan karena tidak punya biaya berobat. Sebanyak 0,47 persen penduduk juga tidak berobat karena tidak ada biaya



untuk transportasi menuju fasilitas kesehatan. Hal ini perlu dievaluasi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah harus memastikan seluruh masyarakat memiliki akses yang mudah terhadap fasilitas kesehatan. Selain dari adanya transportasi yang mudah untuk menuju fasilitas kesehatan, diperlukan juga adanya sarana kesehatan yang memadai hingga tingkat terkecil. Hal ini bisa dilakukan dengan menambahkan puskesmas, atau puskesmas pembantu untuk daerah yang masih belum ada fasilitas kesehatannya.

### 3.3. Kesehatan Ibu dan Balita

Kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan balita merupakan salah satu target dalam SDGs di sektor kesehatan. Diharapkan pada tahun 2030, dapat mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kematian hidup. Juga diharapkan pada tahun 2030 dapat mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Balita per 25 per 1.000.<sup>1</sup>

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh di setiap 100.000 kelahiran hidup (*Profil Kesehatan Indonesia 2018*)

Upaya untuk menurunkan AKI dapat dilakukan dengan menjamin setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas dan pemahaman mengenai kesehatan ibu hamil dan janin yang dikandungnya. Upaya yang dapat dilakukan dapat berupa pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan keluarga berencana termasuk KB pasca persalinan.

---

<sup>1</sup> Target 3.1 dan 3.2 dari SDGs



Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis yang memiliki kualifikasi dan terampil dalam membantu proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Keberhasilan program ini diukur melalui indikator persentase tenaga penolong dan fasilitas tempat persalinan yang digunakan. Oleh karena itu, Pemerintah diharapkan mampu memperluas akses, meningkatkan sarana prasarana pelayanan, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pelayanan kesehatan.

**Tabel 6. Persentase Perempuan Umur 15-49 Tahun Yang Pernah Melahirkan Dalam 2 Tahun Terakhir Penolong Proses Kelahiran Terakhir di Kota Bandung, 2018 – 2020 (Persen)**

Penolong Persalinan	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Tenaga Kesehatan</b>			
Dokter Kandungan	45,21	35,90	39,45
Dokter Umum	1,22	1,69	2,26
Bidan	52,56	62,41	57,41
Perawat	1,02	0,00	0,00
Tenaga Paramedis Lainnya	0,00	0,00	0,00
<b>Bukan Tenaga Kesehatan</b>			
Dukun Bersalin	0,00	0,00	0,36
Lainnya	0,00	0,00	0,53
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Jawa Barat, 2018 - 2020*

Dari tabel 6 dapat diketahui bahwa sebagian besar wanita usia 15-49 yang melahirkan di Kota Bandung ditolong oleh Bidan dalam menangani proses kelahiran terakhirnya. Persentase bidan sebagai penolong proses kelahiran terakhir mencapai 57,41 persen. Sebanyak 35,90 persen wanita melahirkan dengan bantuan dokter kandungan dan



sebanyak 2,26 persen dengan bantuan dokter umum. Penanganan kelahiran di Kota Bandung tahun 2020 tidak sepenuhnya dilakukan oleh tenaga kesehatan. Sebagian kecil penduduk masih memanfaatkan jasa dukun bersalin dan tenaga lainnya dalam menolong proses persalinan. Terdapat 0,36 persen penduduk yang masih menggunakan jasa dukun bersalin dan 0,53 persen tenaga lainnya untuk membantu persalinan.

Sedangkan jika dilihat dari tempat melahirkannya, persentase perempuan berumur 15-49 tahun pernah kawin yang pernah melahirkan dalam dua tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut.

**Tabel 7. Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun Yang Pernah Kawin Yang Pernah Melahirkan Dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup Yang Terakhir di Kota Bandung, 2018-2020 (Persen)**

Tempat Melahirkan	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah Sakit/RSIA	42,19	36,57	35,07
RS bersalin/Klinik	30,74	44,16	41,54
Puskesmas/Pustu	22,60	17,00	19,96
Rumah	2,74	2,27	3,44
Lainnya	1,73	0	0
Jumlah	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Jawa Barat, 2018 - 2020*

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 sebanyak 41,54 persen masyarakat memilih melahirkan di RS Bersalin/Klinik, 35,07 persen melahirkan rumah sakit/RSIA, sebanyak 19,96 persen melahirkan di puskesmas atau pustu, dan 3,44 persen melahirkan di rumah.

Kesehatan bayi yang baru dilahirkan juga merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian. Salah satu parameter yang diukur pada saat bayi baru lahir adalah berat badan. Bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2,5 kg dianggap beresiko



mengalami gangguan kesehatan yang nantinya akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.

Dari data SUSENAS 2020 diketahui bahwa seluruh bayi lahir hidup di Kota Bandung sudah dilakukan penimbangan berat badan saat lahir. Terdapat 98,30 persen berat anak lahir hidup di Kota Bandung di atas 2,5 kg. Hanya terdapat 1,70 persen bayi yang dilahirkan dengan berat lahir di bawah 2,5 kg. Berat bayi lahir yang kurang dari 2,5 kg dapat disebabkan oleh berbagai macam hal, di antaranya gangguan kesehatan saat ibu hamil, kekurangan asupan nutrisi baik bagi ibu ataupun bayi saat proses kehamilan, ataupun terdapat gangguan kesehatan pada ibu hamil. Untuk itu diperlukan pemeriksaan yang rutin dan berkualitas selama proses kehamilan.

Dalam melihat kesehatan bayi dan balita, keberhasilan program imunisasi dari pemerintah dan keberlanjutan pemerian ASI perlu dilakukan. Salah satu upaya pemerintah memiliki program imunisasi terjadwal. Imunisasi dilakukan untuk meningkatkan ketahanan tubuh pada anak hingga terhindar dari penyakit yang berbahaya. Pada tahun 2020, di Kota Bandung tercatat 65,05 persen balita telah mendapat imunisasi lengkap dan masih terdapat 34,95 bayi dan balita yang imunisasinya belum lengkap. Dilihat dari keberlanjutan pemberian ASI, rata-rata lama pemberian ASI untuk bayi dan balita di Kota Bandung adalah 11,25 bulan. Rata-rata di Kota Bandung lebih tinggi dari rata-rata lama pemberian ASI di Jawa Barat sebesar 10,10 bulan.

Ketersediaan tenaga kesehatan yang terampil dan terakreditasi serta fasilitas pelayanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga upaya penguatan kesehatan dasar yang berkualitas melalui peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dapat terwujud.



## BAB IV PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu hal penting yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pendidikan merupakan hak dasar warga negara Indonesia. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1. Di pasal lain, yaitu pasal 28C, ayat 1 dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia.

Selanjutnya dalam pasal 31 ayat 2 UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang UU No 20 tahun 2003 tersebut juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan. Baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar. UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warganegara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong



tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

Mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini, diantaranya Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator-indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS.

### 4.1. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).

Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di sektor pendidikan. Sektor pendidikan sendiri menurut data IPM Indonesia yang dirilis oleh United Nation Development Program (UNDP) pada 2 November 2011 memberikan kontribusi sebanyak 0,58. Oleh karena itu sektor pendidikan memegang peranan penting dalam penghitungan IPM (<http://www.pikiran-rakyat.com/node/164932>).

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam sektor pendidikan, pemerintah menempuh berbagai upaya dengan meningkatkan waktu rata-





rata lama sekolah penduduk usia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antarjenjang pendidikan. Cara paling efektif untuk menaikkan waktu rata-rata lama sekolah bukan dengan menyekolahkan kembali penduduk Indonesia yang telah berusia lanjut, tetapi mengupayakan agar tidak ada lagi peserta didik yang putus sekolah.

Pemerintah telah menggulirkan beberapa program yang berkaitan dengan pendidikan. Program Bantuan Operasional Sekolah adalah salah satu program bantuan dari pemerintah kepada seluruh sekolah yang terdaftar resmi berupa bantuan biaya operasional sekolah. Program lainnya adalah Program Indonesia Pintar, yaitu program pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin. Dengan adanya program tersebut, diharapkan seluruh anak Indonesia dapat bersekolah.

Pada tahun 2020 IPM Kota Bandung mencapai 81,51. Angka ini berkurang 0,11 poin dibanding dengan IPM Kota Bandung Tahun 2019 yang mencapai 81,62. Angka IPM Kota Bandung ini merupakan IPM tertinggi diantara kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. Rata-rata lama sekolah penduduk di Kota Bandung pada tahun 2020 adalah 10,75 tahun. Variabel lama sekolah ini mengalami kenaikan 0,01 tahun dari rata-rata lama sekolah pada tahun 2019 yang mencapai 10,74 tahun. Secara umum dapat dikatakan bahwa sebagian besar penduduk Kota Bandung baru mengenyam pendidikan selama 10,75 tahun setara dengan kelas X di jenjang SMA.

**Tabel 8. Angka Harapan Lama Sekolah (EYS) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS) Kota Bandung (Tahun), 2018-2020**

Indikator Pendidikan	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Lama Sekolah (EYS)	14,18	14,19	14,20
Rata-rata lama sekolah (MYS)	10,63	10,74	10,75

Sumber: *ipm.bps.go.id*



Demikian pula dengan Angka Harapan Lama Sekolah. Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka ini dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun. Pada tahun 2020, Angka Harapan Lama Sekolah Kota Bandung mencapai 14,20 tahun, naik 0,01 tahun dari tahun 2019 yang sebesar 14,19. Ini berarti, pada tahun 2020 penduduk usia 7 tahun di Kota Bandung diharapkan dapat bersekolah selama 14,19 tahun.

**Tabel 9. Angka Harapan Lama Sekolah (EYS) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS) (Tahun), Kota Bandung 2018 - 2020**

Indikator Pendidikan	Kota Bandung			Jawa Barat		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angka Harapan Lama Sekolah	14,18	14,19	14,20	12,45	12,48	12,50
Rata-rata lama sekolah	10,63	10,74	10,75	8,15	8,37	8,55

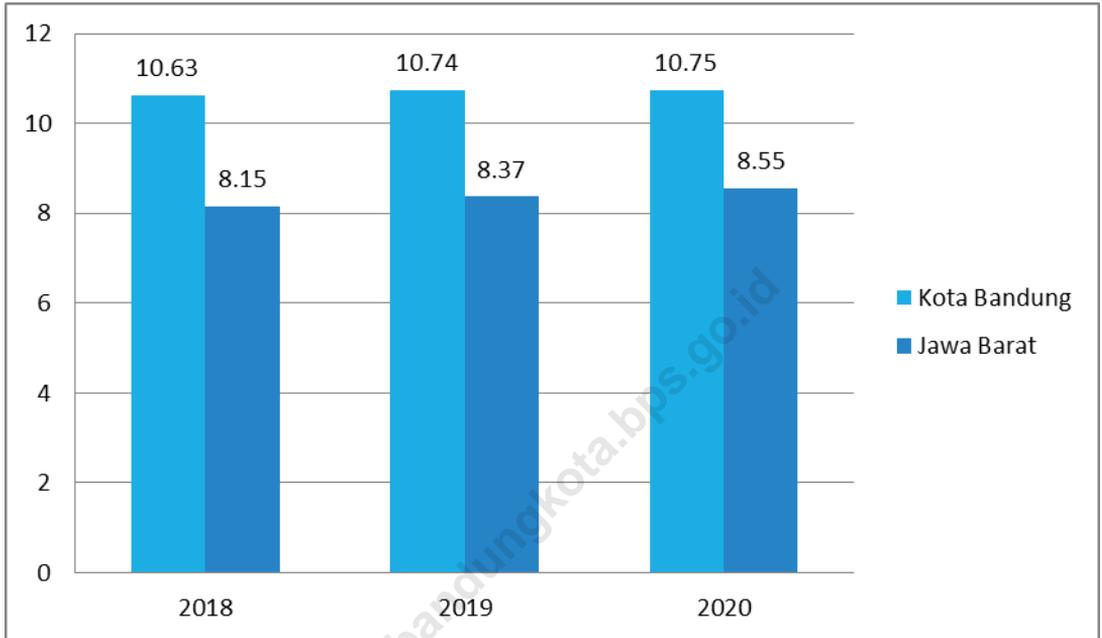
Sumber: [ipm.bps.go.id](http://ipm.bps.go.id)

Jika dibandingkan dengan Jawa Barat, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah penduduk Kota Bandung di tahun 2020 berada di atas rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah penduduk Jawa Barat. Terdapat selisih 1,70 tahun untuk angka harapan lama sekolah, dan 2,20 tahun untuk komponen rata-rata lama sekolah. Pada tahun 2020 Angka Harapan Lama Sekolah Jawa Barat adalah 12,50 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah Jawa Barat adalah 8,55 tahun. Perbedaan ini tentu tidak lepas dari ketersediaan sarana pendidikan di Kota Bandung yang lebih lengkap dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Jawa Barat.





Grafik 7. Rata-rata Lama Sekolah, Kota Bandung 2018-2020 (Tahun)

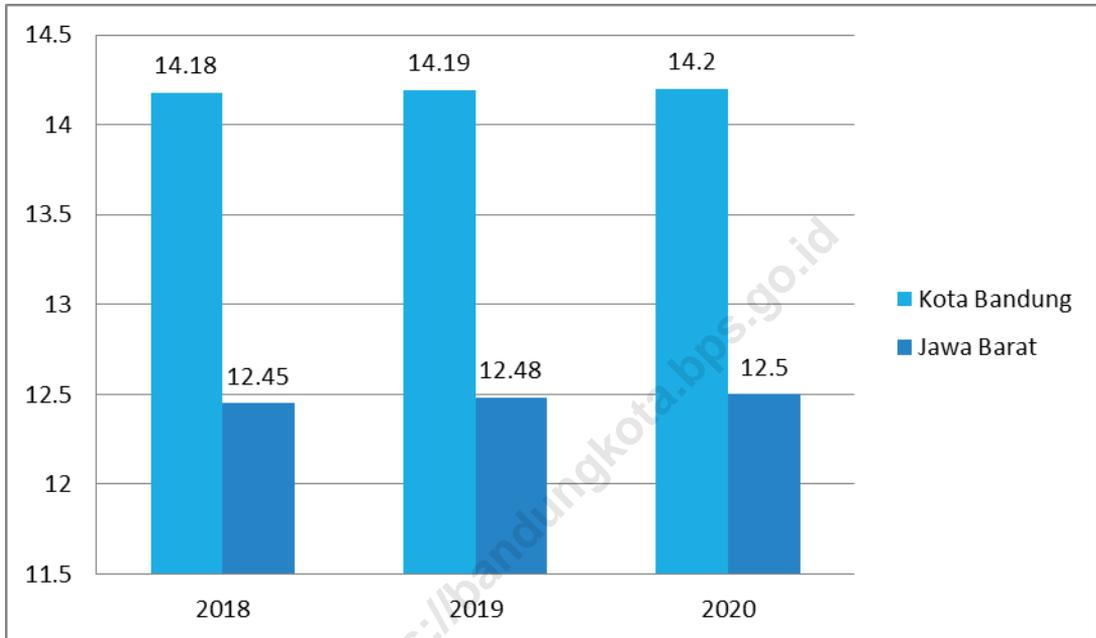


Sumber: [www.jabar.bps.go.id](http://www.jabar.bps.go.id)

Tahun 2020, harapan lama sekolah Kota Bandung merupakan angka harapan lama sekolah tertinggi di Jawa Barat. Sedangkan rata-rata lama sekolah Kota Bandung merupakan rata-rata lama sekolah tertinggi ketiga setelah Kota Depok (11,28 tahun), Kota Bekasi (11,16), dan Kota Cimahi (10,96) sekolah dapat menikmati pendidikan 12 tahun sebagaimana direncanakan oleh pemerintah.



Grafik 8. Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Bandung dan Jawa Barat, Tahun 2018-2020 (Tahun)



Sumber: [www.jabar.bps.go.id](http://www.jabar.bps.go.id)

## 4.2. Partisipasi Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/ keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikannya yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi. Dengan semakin meningkatnya keterampilan/keahlian akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah.

**Tabel 10. Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun Ke Atas Menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, Kota Bandung 2020**

Karakteristik (1)	Tidak/belum pernah bersekolah (2)	Masih Bersekolah			Tidak bersekolah lagi (6)	Jumlah (7)
		SD/ sederajat (3)	SMP/ sederajat (4)	SMA/ ke atas (5)		
<b>Jenis Kelamin</b>						
Laki-laki	0,00	30,98	9,87	28,89	29,87	100
Perempuan	0,00	29,34	12,18	31,14	27,34	100
<b>Kelompok Pengeluaran</b>						
40 persen terbawah	0,00	34,25	13,89	20,50	30,90	100
40 persen tengah	0,00	31,05	9,95	29,98	29,02	100
20 persen teratas	0,00	19,16	6,49	51,67	22,68	100
<b>Kota Bandung</b>	0,00	30,18	11,00	29,99	28,63	100

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh penduduk yang berusia 7-24 tahun telah bersekolah. Status masih bersekolah memiliki persentase yang berbeda di setiap jenjangnya. Di Kota Bandung, rata-rata persentase untuk yang bersekolah di jenjang SD/ sederajat 30,18 persen, SMP/ sederajat 11,00 persen, SMA ke atas 29,99 persen. Sedangkan persentase untuk penduduk yang tidak bersekolah lagi adalah 28,63 persen.



Bila ditinjau dari segi kelompok pengeluaran, penduduk berumur 7-24 tahun dengan kelompok pengeluaran 40 persen terbawah memiliki persentase sekolah tertinggi hanya untuk jenjang SD dan SMP. Dari tabel di atas, penduduk dengan karakteristik tersebut 34,25 persen masih bersekolah di jenjang SD/ sederajat, 13,89 persen masih bersekolah di jenjang SMP/ sederajat. Pada jenjang SMA/ keatas, hanya sebesar 20,50 persen penduduk kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang sekolah. Sedangkan untuk penduduk yang tidak bersekolah lagi adalah sebesar 30,90 persen. Jumlah tersebut paling tinggi dibandingkan dengan kelompok pengeluaran lain.

Sedangkan untuk penduduk 7-24 tahun dengan kelompok pengeluaran 40 persen tengah 31,05 persen di antaranya masih sekolah di jenjang SD/ sederajat. 9,95 persen sedang bersekolah di jenjang SMP/ sederajat, 29,98 persen sedang bersekolah di jenjang SMA ke atas. Sisanya, yaitu 29,02 persen berstatus tidak bersekolah lagi.

Penduduk usia 7-24 tahun dengan kelompok pengeluaran 20 persen teratas yang berstatus masih bersekolah di jenjang SD/ sederajat adalah sebesar 19,16 persen, jenjang SMP/ sederajat sebesar 6,49 persen, dan SMA/ sederajat 51,67 persen. Jumlah penduduk yang sedang bersekolah di SMA/ keatas tersebut paling banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok pengeluaran lain yang sedang bersekolah di SMA/ keatas.

Persentase terbesar penduduk usia 7-24 tahun yang berstatus masih sekolah di jenjang SD/ sederajat berasal dari kelompok pengeluaran 40 persen terbawah. Sedangkan persentase terkecil nya berasal dari kelompok pengeluaran 20 persen teratas. Demikian pula untuk jenjang SMP/ sederajat. Sedangkan untuk jenjang SMA/ sederajat berlaku sebaliknya. Persentase terbesar penduduk usia 7-24 tahun yang berstatus masih sekolah di jenjang SMA ke atas berasal dari penduduk dengan kelompok pengeluaran 20 persen teratas.

Sedangkan persentase terbesar untuk status tidak bersekolah lagi berasal dari kelompok pengeluaran 40 persen terbawah. Besar persentase tersebut tidak berbeda jauh dengan kelompok pengeluaran 40 persen tengah. Besaran persentase kedua kelompok tersebut lebih besar dari persentase status tidak bersekolah lagi Kota Bandung. Kelompok





pengeluaran 20 persen teratas merupakan kelompok yang terkecil persentasenya di status tidak bersekolah lagi.

Perbedaan partisipasi sekolah dilihat dari kelompok pengeluaran menyiratkan masih adanya kesenjangan akses sekolah di masyarakat. Penduduk dengan kelompok 40 persen kebawah cenderung tidak banyak yang bersekolah ke jenjang SMA/keatas. Hal ini perlu dievaluasi kembali penyebabnya. Pasalnya, berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan pendidikan, pemerintah telah mewajibkan pendidikan wajib belajar dua belas tahun bagi warganya. Namun, masyarakat berpendapatan 40 persen terbawah mungkin memiliki pertimbangan lain untuk memutuskan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/keatas. Hal ini tentu perlu ditinjau, karena perbedaan ini akan menyebabkan penduduk yang tidak bersekolah lagi, baik karena bekerja, menikah, menganggur, sebagian besar berpendidikan rendah.

### 4.3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran dalam kesejahteraan. Secara umum tingkat pendidikan turut mempengaruhi tingkat kesejahteraan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin luas pula pengetahuan dan keterampilannya. Dengan demikian akan dihasilkan tenaga kerja yang berkualitas sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupannya.



**Tabel 11. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Tertinggi, Kota Bandung 2020 (Persen)**

Ijazah/STTB Tertinggi Yang Dimiliki	Laki -laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Mempunyai Ijazah	3,36	5,38	4,37
SD/MI	16,80	18,68	17,74
SMP/Mts	20,54	21,11	20,82
SMA/SMK/MA	43,39	37,93	40,67
Diploma I dan Diploma II	0,69	1,26	0,98
Akademi/Diploma III	3,31	3,97	3,64
Diploma IV s.d S3	11,89	11,67	11,78

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat JawaBarat 2020

Pada tahun 2020 terdapat 40,67 persen penduduk usia di atas 15 tahun di Kota Bandung berijazah tertinggi SMA/SMK/MA. Pendidikan tertinggi kedua terbanyak yang ditamatkan oleh penduduk usia di atas 15 tahun di Kota Bandung adalah SMP/Mts disusul oleh SD/MI di tempat ketiga dengan nilai 17,74 persen. Ijazah pendidikan di atas jenjang SMA dimiliki oleh 20,82 persen penduduk Kota Bandung. Pada tahun 2020, terdapat 4,37 persen penduduk kota Bandung yang berusia di atas 15 tahun yang tidak mempunyai ijazah pendidikan sama sekali. Di Kota Bandung terdapat 4,62 persen penduduk yang memiliki ijazah Diploma I-III. Jumlah penduduk yang memiliki ijazah DIV/S1/S2/S3 sebanyak 11,78 persen.

Jika dilihat dari perbedaan jenis kelamin, Ijazah tertinggi di tingkat SD/MI, SMP/MTs untuk persentase penduduk perempuan yang mengenyam pendidikan terlihat lebih tinggi hampir disetiap jenjang pendidikan dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Namun, untuk jenjang pendidikan yang cukup tinggi yaitu pendidikan SMA/SMK/MA, persentase penduduk laki-laki lebih banyak yaitu 43,39 persen dibandingkan dengan persentase penduduk perempuan yang menerima ijazah jenjang tersebut yaitu hanya 37,93 persen. Selain itu, di jenjang DIV s.d S3, jumlah persentase penduduk laki-laki yang



menerima ijazah tersebut lebih tinggi yaitu sebesar 11,89 persen, sementara jumlah penduduk perempuan yang menerima ijazah tersebut hanya sebesar 11,67 persen. Hal ini menunjukkan masih ada ketidaksetaraan gender dalam hal pendidikan di Kota Bandung. Pada jenjang pendidikan yang tinggi cenderung didominasi oleh laki-laki.

**Tabel 12. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki dan Kelompok Pengeluaran, Kota Bandung 2020 (Persen)**

Kelompok Pengeluaran	Tidak punya ijazah SD	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA ke atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>40 persen terbawah</b>	6,41	23,23	29,47	40,89
<b>40 persen tengah</b>	4,42	17,04	17,93	60,61
<b>20 persen teratas</b>	2,17	8,73	11,88	77,22
<b>Kota Bandung</b>	4,65	17,46	20,82	57,07

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, 2020

Pada tahun 2020, persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kota Bandung yang memiliki ijazah SD sebanyak 17,46 persen. Persentase yang memiliki ijazah SMP sederajat sebesar 20,82 persen. Persentase terbanyak yaitu penduduk yang memiliki ijazah SMA keatas sebesar 57,07 persen. Selain itu, masih terdapat 4,65 persen penduduk 15 tahun ke atas di Kota Bandung yang tidak memiliki ijazah.

Ditinjau dari sisi pengeluaran, persentase terbesar penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah berasal dari kelompok pengeluaran 40 persen terbawah. Demikian pula untuk kepemilikan ijazah tertinggi di jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat. Namun pada kepemilikan ijazah di jenjang SMA ke atas, kelompok pengeluaran 40 persen terbawah merupakan kelompok yang paling sedikit memilikinya. Kelompok 20 persen teratas merupakan kelompok yang memiliki persentase terbesar yang memiliki ijazah SMA ke atas.

Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang termasuk kelompok 40 persen terbawah sebanyak 6,41 persennya tidak memiliki ijazah, sebanyak 23,23 persen memiliki



ijazah SD/ sederajat, 29,47 persen memiliki ijazah SMP/ Sederajat dan sebesar 40,89 persen memiliki ijazah SMA ke atas. Penduduk kelompok 40 persen terbawah ini memiliki jumlah persentase penduduk yang memiliki ijazah SMA ke atas tertinggi dibandingkan dengan kelompok pengeluaran lain yang nilainya mencapai diatas 50 persen.

Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang termasuk kelompok pengeluaran 20 persen teratas hanya sekitar 2,17 persen yang tidak memiliki ijazah. Nilai tersebut merupakan nilai terendah dibandingkan dengan persentase kelompok pengeluaran lain. Sementara untuk persentase penduduk yang memiliki ijazah SMA ke atas, penduduk dengan kelompok pengeluaran ini menempati nilai yang tertinggi yaitu sebesar 77,22 persen. Persentase penduduk pengeluaran 20 persen teratas mayoritas telah memiliki ijazah SMA ke atas.

Gambaran di atas masih menunjukkan adanya kendala dalam menjalani proses pendidikan. Salah satu penyebabnya adalah masalah ekonomi (kemiskinan) yang ditunjukkan oleh perbedaan persentase lulusan pada kelompok pengeluaran. Selain itu, di samping faktor ekonomi, faktor persepsi masyarakat yang merasakan bahwa pendidikan bukan hal yang penting turut menghambat partisipasi pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah Kota Bandung terus berupaya meningkatkan pelayanan akses pendidikan yang merata dan mudah dijangkau masyarakat serta memberikan penyelenggaraan pendidikan yang layak dari segala sisi di seluruh wilayah Kota Bandung mulai dari pusat Kota Bandung sampai wilayah pelosok Kota Bandung.





## **BAB V KETENAGAKERJAAN**

Salah satu misi Pemerintah Kota Bandung seperti yang tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 adalah membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan. Salah satu sasaran dalam pembangunan Kota Bandung adalah meningkatkan kesempatan kerja.

Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah pembangunan di Kota Bandung. Jumlah angkatan kerja yang besar di Kota Bandung belum sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja sehingga menciptakan pengangguran. Masalah pengangguran yang tidak tertangani dengan baik akan menimbulkan masalah sosial yang lain.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan wilayah dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) bulan Agustus 2020. Indikator tersebut, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dan jumlah jam kerja, serta persentase pekerja menurut kelompok upah/ gaji/pendapatan bersih.



## 5.1. Angkatan Kerja dan Pengangguran

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Indikator ini bermanfaat untuk mengetahui jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja. Semakin tinggi jumlah angkatan kerja berarti semakin banyak jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja. Jumlah angkatan kerja merupakan salah satu variabel yang digunakan untuk menghitung Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Pengangguran terbuka adalah mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, atau mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha atau mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, termasuk mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. Indikator untuk mengukur pengangguran biasanya disebut sebagai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan.

Penduduk usia kerja (lebih dari 15 tahun) di Kota Bandung pada bulan Agustus 2020 sebanyak 2.032.099 orang, bertambah 79.466 orang dibanding Agustus 2019. Sedangkan penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan pengangguran pada bulan Agustus 2020 adalah sebanyak 1.314.930 orang.

Sebesar 88,81 persen angkatan kerja di Kota Bandung melakukan aktivitas bekerja. Bekerja di sini berarti melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit selama satu jam tidak terputus seminggu yang lalu, juga termasuk kegiatan pekerja tidak dibayar atau pekerja keluarga yang membantu suatu kegiatan atau usaha ekonomi.



**Tabel 13. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bandung, 2018-2020 (persen)**

Tahun	TPAK	TPT
(1)	(2)	(3)
<b>2018</b>	61,98	8,01
<b>2019</b>	65,98	8,16
<b>2020</b>	64,71	11,19

Sumber: Bandung Dalam Angka 2018-2020

TPAK Agustus 2020 Kota Bandung sebesar 64,71 persen. Artinya sebesar 64,71 persen penduduk Kota Bandung merupakan angkatan kerja dibandingkan jumlah keseluruhan penduduk usia kerja. Jumlah TPAK tahun 2020 ini menurun dibandingkan dengan jumlah TPAK tahun 2019. Ini menunjukkan bahwa di tahun 2020 jumlah penduduk angkatan kerja justru menurun. Penurunan tidak terlalu drastis yaitu sebesar 1,27 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2020 Kota Bandung sebesar 11,19 persen, naik 3,03 persen dibanding tahun 2019 yang sebesar 8,16 persen. Ini berarti 11,16 persen angkatan kerja Kota Bandung dalam keadaan tidak bekerja atau pengangguran. Jumlah angkatan kerja yang berstatus pengangguran adalah 147.081 orang. Jika dibanding tahun 2019 maka jumlah pengangguran di Kota Bandung tahun 2019 bertambah 42.014 orang.

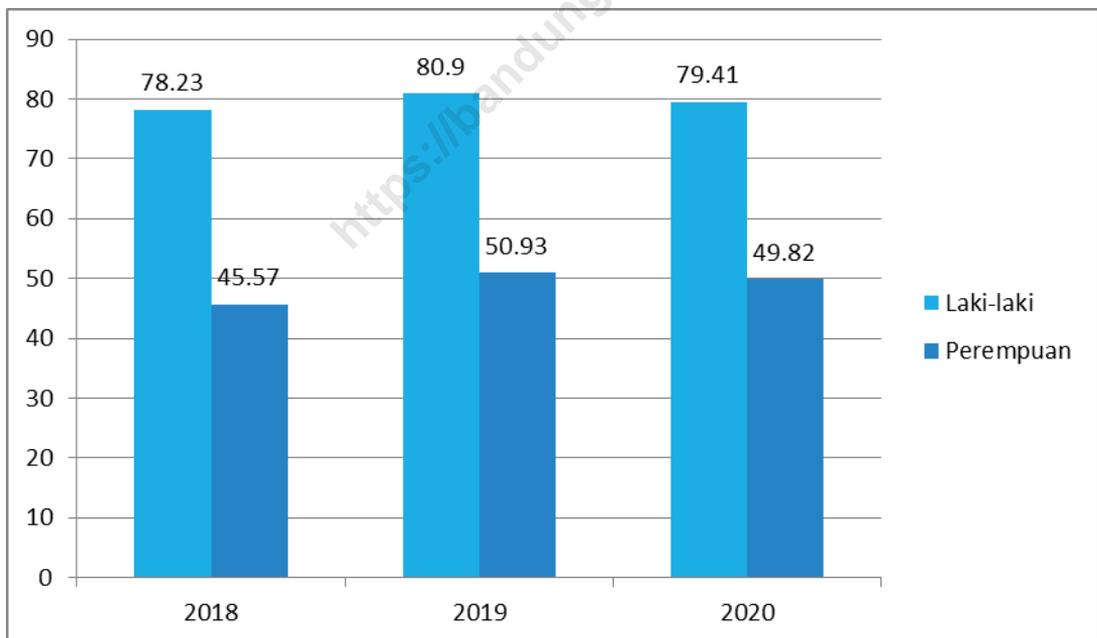
Penambahan yang signifikan pada jumlah pengangguran di tahun 2020 ini tentu tidak lepas dari adanya pandemi yang terjadi di Indonesia. Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak perekonomian terhadap masyarakat Indonesia. Pembatasan kegiatan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah membuat berbagai pelaku usaha mengalami kerugian. Banyak pelaku usaha yang akhirnya terpaksa harus memutus kerja para pegawainya agar perusahaan tidak defisit. Hal ini membuat banyak penduduk angkatan kerja yang kehilangan pekerjaannya. Beberapa angkatan kerja yang baru pun akhirnya sulit juga untuk mendapatkan pekerjaan.



Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa TPAK laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Pada tahun 2020, TPAK laki-laki sebesar 79,41 persen sedangkan TPAK perempuan sebesar 49,82 persen Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki masih mendominasi dalam aktivitas bekerja atau usaha ekonomi, sedangkan partisipasi perempuan masih sangat rendah dalam kegiatan ekonomi.

TPAK penduduk laki-laki di Kota Bandung tahun 2020 menurun dibanding tahun 2019 yang sebesar 80,90 persen. Demikian pula dengan TPAK penduduk perempuan di Kota Bandung tahun 2020 sebesar 49,82, menurun 1,11 persen dibanding tahun 2019 yang 50,93 persen. Terjadinya penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ini tentu masih berkaitan dengan terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia

**Grafik 9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Kota Bandung, 2018-2020 (persen)**

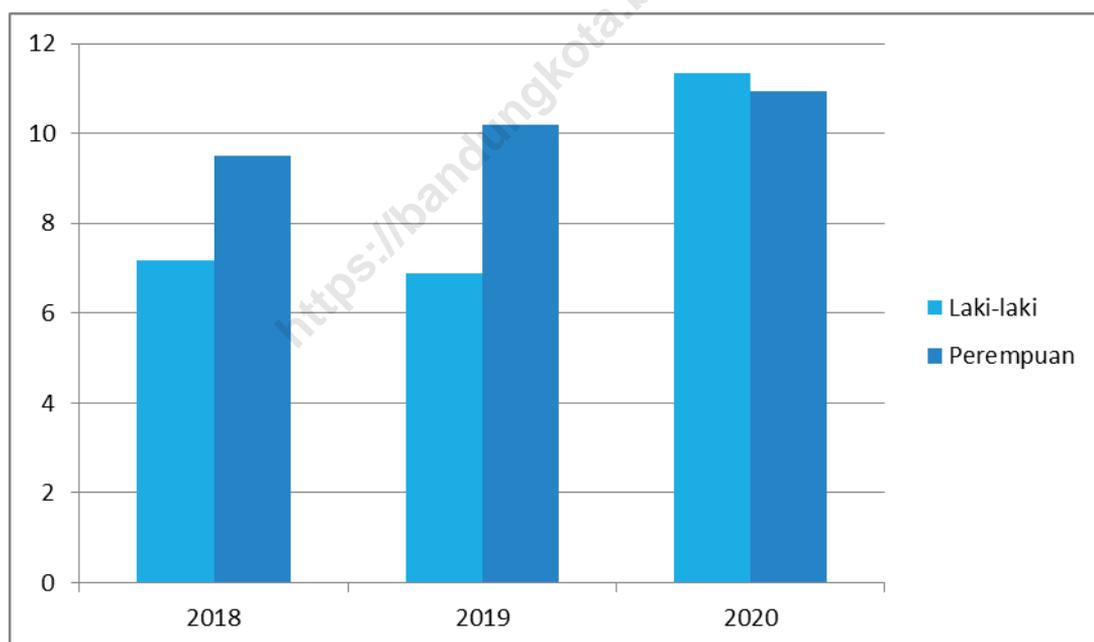


Sumber: Kota Bandung Dalam Angka 2018-2020



Sedangkan menurut jenis kelamin, TPT laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan TPT perempuan. TPT laki-laki Kota Bandung tahun 2019 sebesar 11,33 persen, turun 4,45 poin dari 6,88 persen di tahun 2019. TPT penduduk laki-laki 2019 merupakan TPT tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Hal ini cukup mengejutkan karena di tahun 2020 jumlah pengangguran laki-laki meningkat drastis. Pada tahun 2020, TPT penduduk perempuan Kota Bandung mengalami peningkatan setiap tahunnya. TPT penduduk perempuan Kota Bandung tahun 2020 sebesar 10,95 persen naik 0,76 poin dari 10,19 persen di tahun 2019 dan merupakan TPT tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

**Grafik 10. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Kota Bandung 2018-2020**



*Sumber: Kota Bandung Dalam Angka 2018-2020*

Peningkatan tingkat pengangguran di Kota Bandung menunjukkan bahwa banyak penduduk angkatan kerja yang kehilangan pekerjaannya terkait adanya pandemi yang berdampak besar terhadap perekonomian. Selain itu, lapangan kerja yang sudah ada tidak

## Ketenagakerjaan

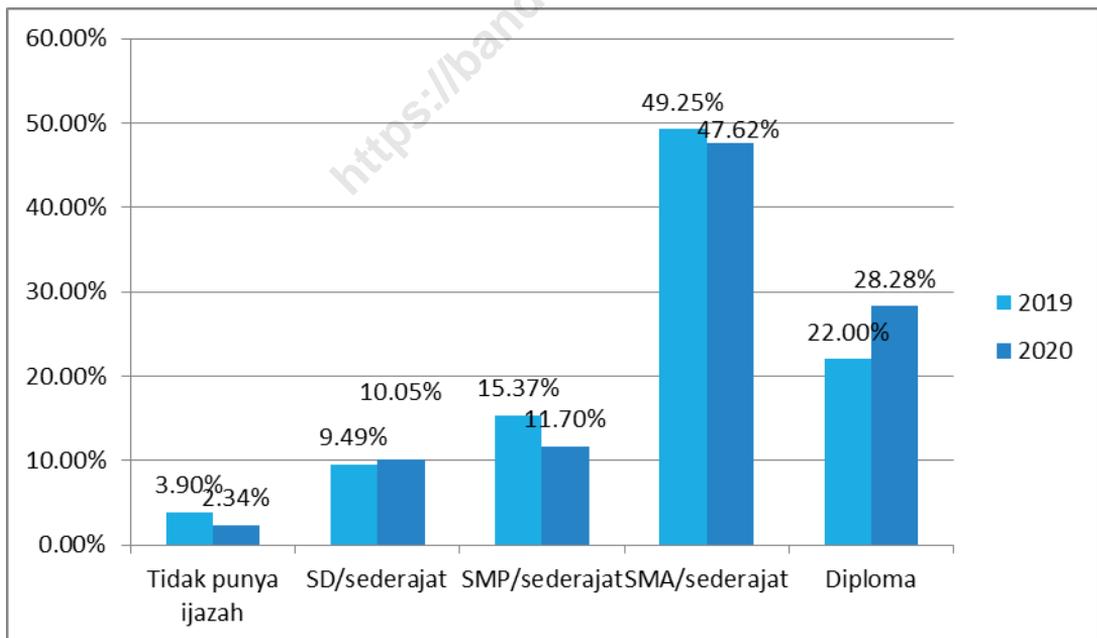


mencukupi untuk para pekerja baru atau mereka yang baru kehilangan pekerjaannya. Selain itu, Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan untuk bekerja cenderung meningkat setiap tahun.

### 5.2. Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan disebutkan sebagai salah satu jalan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan pendidikan diharapkan dapat mendapat pekerjaan yang lebih baik. Namun bila jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan tenaga kerja yang ada, maka akan terjadi persaingan dalam memperoleh pekerjaan. Tenaga kerja yang tidak bekerja maka akan menjadi pengangguran.

**Grafik 11. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Bandung 2020 (persen)**



*Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat, 2020*





Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk pengangguran terbuka adalah berpendidikan tertinggi SMA/SMK sederajat. Selanjutnya yang merupakan kedua terbanyak adalah penduduk dengan pendidikan Diploma/Universitas. Hal ini tidak terlepas dari jumlah angkatan kerja yang berpendidikan SMA/ sederajat dan diploma/universitas yang merupakan jumlah angkatan kerja terbanyak. Namun lapangan kerja yang ada lebih sedikit dari jumlah tenaga kerja yang tersedia.

Jika dibandingkan dengan kondisi 2020, persentase pengangguran terbuka yang berpendidikan SMA/ sederajat mengalami sedikit penurunan, yaitu 49,25 persen di tahun 2019 menjadi 47,62 persen di tahun 2020. Sedangkan pengangguran terbuka yang berpendidikan diploma/universitas meningkat 6,28 persen dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya. Jumlah pengangguran dengan pendidikan diploma/universitas ini meningkat sesuai dengan meningkatnya lulusan baru angkatan kerja yang lebih banyak namun tidak disertai adanya lapangan kerja yang tersedia, terlebih lagi dalam situasi pandemi seperti ini.

Untuk pengangguran terbuka dengan pendidikan di bawah SLTA mengalami kondisi yang berbeda-beda. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang berstatus pengangguran terbuka dan berpendidikan SMP/ sederajat mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu 15,37 persen di tahun 2019 menjadi 11,70 persen di tahun 2020. Pengangguran terbuka dengan pendidikan tertinggi SD/ sederajat mengalami peningkatan dari 9,49 persen di tahun 2019 menjadi 10,05 persen di tahun 2020. Sedangkan untuk pengangguran terbuka yang tidak berijazah mengalami penurunan dari 3,90 persen di tahun 2019 menjadi 2,34 persen di tahun 2020.

Salah satu penyebab tingginya tingkat pengangguran pada penduduk berijazah SMA/SMK sederajat dan Diploma/Sarjana disebabkan karena ketimpangan antara jumlah industri yang tersedia di Kota Bandung dengan jumlah lulusan SMK dan jenjang di atasnya.

## Ketenagakerjaan



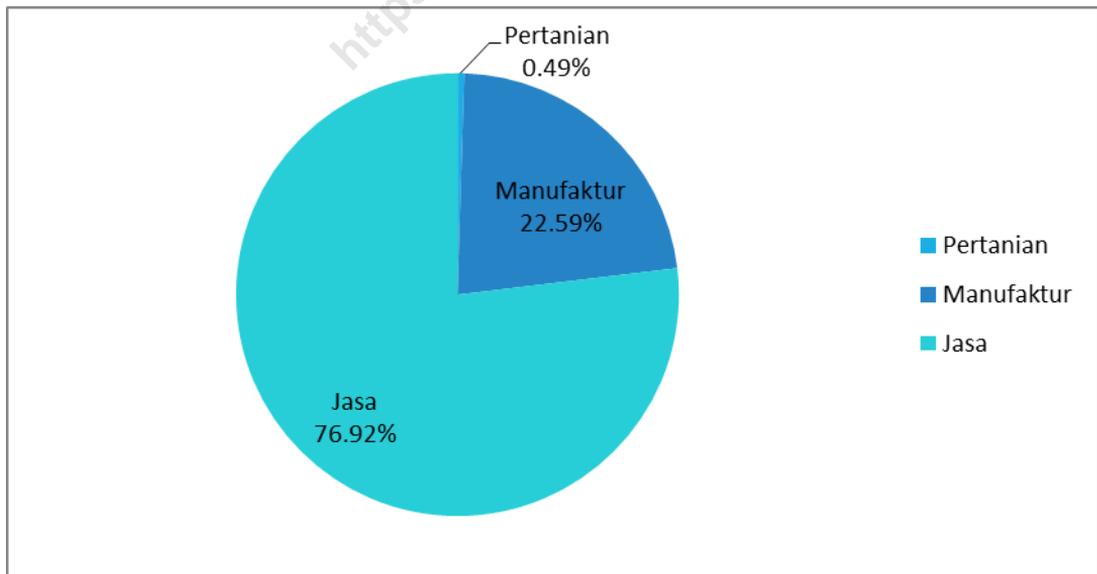
Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan dan membuka lapangan kerja agar dapat menyerap tenaga kerja dari kelompok ini.

Pembaruan kurikulum pendidikan di semua jenjang diperlukan untuk mengangkat daya serap tenaga kerja di dunia kerja. Lulusan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan diharapkan mampu mengikuti teknologi yang terus berkembang. Selain itu perlu pula pendidikan untuk meningkatkan kemampuan wirausaha sehingga angkatan kerja yang ada selain dapat masuk ke dalam lapangan kerja namun dapat pula menciptakan lapangan kerja baru di masyarakat.

### 5.3. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dibagi menjadi 3 sektor lapangan usaha yaitu Pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan); Manufaktur; dan Jasa.

**Grafik 12. Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Bandung 2020 (persen)**



Sumber: Kota Bandung dalam Angka, 2020





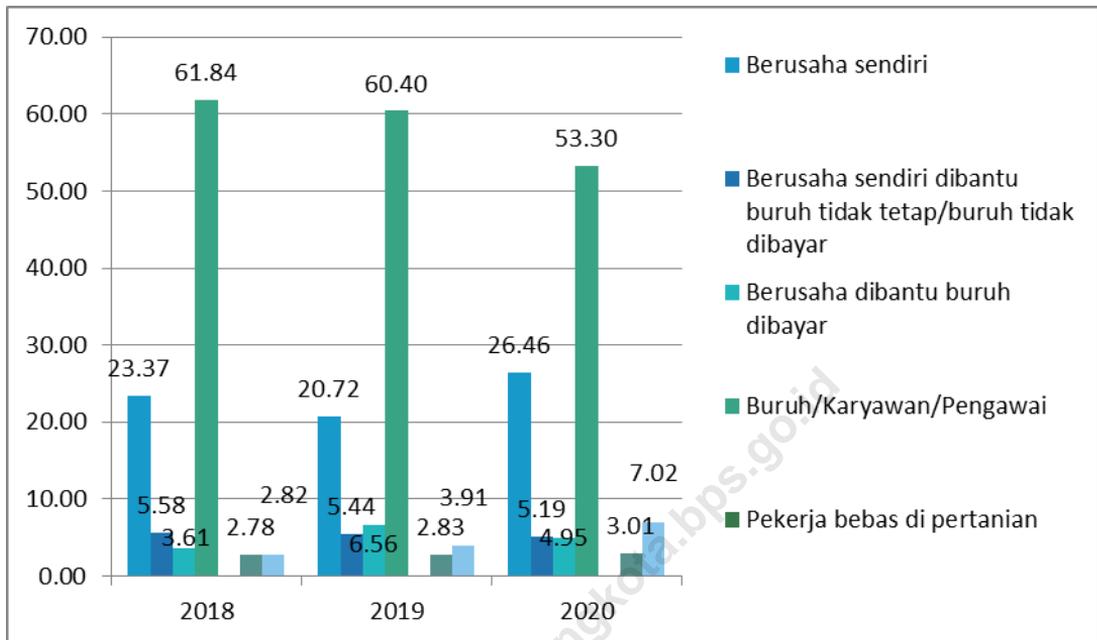
Berdasarkan Grafik 12 dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Kota Bandung bekerja di lapangan usaha Jasa. Persentase penduduk Kota Bandung yang berumur 15 tahun yang bekerja seminggu yang lalu di lapangan usaha Jasa mencapai 76,92 persen. Sedangkan lapangan usaha manufaktur menyerap 22,59 persen tenaga kerja di Kota Bandung. Lapangan usaha pertanian yang memang bukan lapangan usaha dominan di Kota Bandung hanya menyerap 0,49 persen angkatan kerja di Kota Bandung.

Jika dilihat berdasarkan status pekerjaannya, penduduk Kota Bandung usia 15 tahun ke atas yang bekerja dapat dikelompokkan menjadi berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian, dan pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar.

Jika dilihat berdasarkan status pekerjaannya, penduduk Kota Bandung usia 15 tahun ke atas yang bekerja dapat dikelompokkan menjadi berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian, dan pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar.



**Grafik 13. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Satu Pekerjaan Utama di Kota Bandung, 2018-2020 (persen)**



Sumber: Kota Bandung dalam Angka, 2020

Status buruh/karyawan/pegawai adalah status pekerjaan utama yang paling banyak dimiliki oleh penduduk Kota Bandung yang bekerja. Buruh/karyawan/pegawai adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan/ secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Pada tahun 2020, persentase status pekerjaan utama ini mencapai 53,30 persen dari penduduk yang bekerja. Dibandingkan tahun 2019 yang persentasenya sebesar 60,40 persen, persentase ini berkurang sebesar 7,1 persen. Pengurangan jumlah penduduk yang berstatus buruh/karyawan/pegawai ini terkait dengan adanya pandemi Covid-19 yang telah membuat banyak perusahaan harus melepas karyawannya untuk menstabilkan kondisi ekonomi perusahaan yang omsetnya terus menurun selama pandemi.

Status berusaha sendiri merupakan status pekerjaan utama kedua terbanyak di Kota Bandung. Berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko





secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus. Pada tahun 2020, status pekerjaan utama ini mencapai 26,46 persen. Persentase ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2019 yang sebesar 20,72 persen.

Persentase penduduk yang bekerja yang berusaha sendiri dengan dibantu buruh dibayar adalah sebesar 4,95 persen. Persentase ini mengalami penurunan dibanding tahun 2019 yang sebesar 6,56 persen. Bahkan penurunan ini merupakan penurunan yang cukup drastis terlebih tahun-tahun sebelumnya persentase penduduk yang berwirausaha ini selalu meningkat tiap tahunnya. Hal ini terjadi sehubungan dengan adanya pandemi covid-19 yang banyak membuat para wirausaha ini kesulitan secara finansial hingga akhirnya mengalami kebangkrutan.

Pada tahun 2020, di Kota Bandung penduduk yang bekerja dengan status berusaha sendiri, baik sendiri, dibantu buruh dibayar, dan dibantu buruh tidak dibayar, mencakup 36,60 persen. Persentase ini mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 32,72 persen. Keberadaan wirausaha ini sangat penting karena dapat turut meningkatkan roda perekonomian Kota Bandung. Para wirausahawan mampu membuat lapangan kerja secara mandiri, tidak menunggu pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan.

Pekerja bebas di lapangan usaha non pertanian sedikit meningkat di tahun 2020. Persentase penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja sebagai pekerja bebas di lapangan usaha non pertanian tahun 2020 adalah 3,01 persen sedangkan di tahun 2018 sebesar 2,83 persen. Sedangkan pekerja bebas di pertanian turun menjadi 0,07 persen. Para pekerja bebas perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pekerja bebas memiliki pekerjaan yang tidak tetap membuat rentan untuk kehilangan pekerjaan. Keberadaan proyek pembangunan biasanya sangat berpengaruh terhadap kelangsungan status pekerjaan ini. Sedangkan pekerja bebas di pertanian biasanya sangat tergantung pada



cuaca, sehingga di saat cuaca tidak mendukung proses tanam, maka pekerja bebas di lapangan usaha ini akan kehilangan mata pencahariannya.

#### **5.4. Sektor Formal dan Sektor Informal**

Konsep informal yang digunakan dalam publikasi ini mengacu pada kesepakatan dalam ICLS ke-17 (17th *International Conference on Labor Statisticians*) tahun 2003. Sektor informal adalah sekelompok unit produksi yang merupakan bagian dari sektor rumah tangga, atau apa yang disebut sebagai usaha rumah tangga tidak berbadan hukum (*Household Unincorporated Enterprise*).

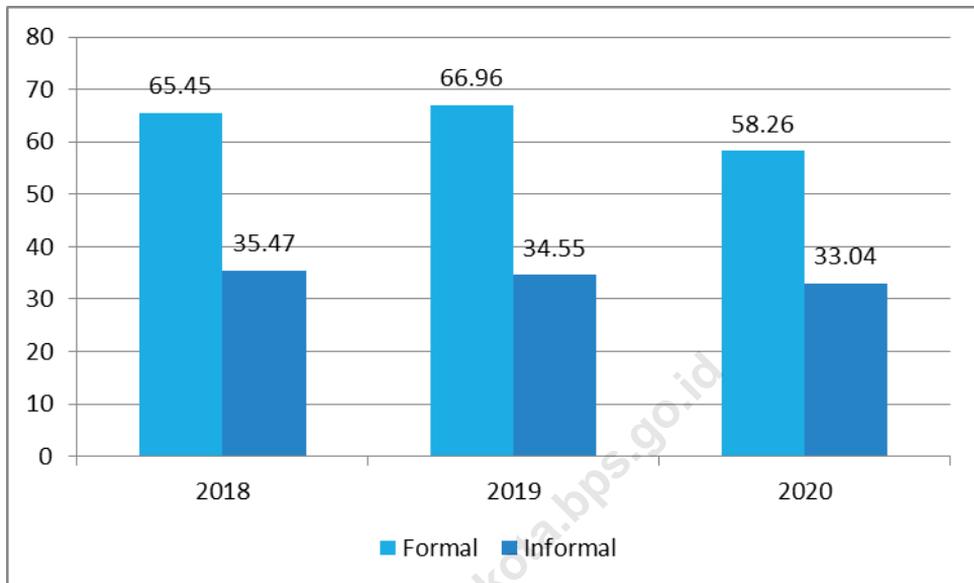
ICLS ke-17 mendefinisikan pekerja informal sebagai "karyawan dianggap memiliki pekerjaan informal jika hubungan kerja mereka tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja, tidak dikenakan pajak pendapatan, minimnya perlindungan sosial atau hak tertentu untuk jaminan kerja (seperti pemberitahuan pemecatan sebelumnya, sistem pembayaran gaji tanpa rincian/nota, atau tiadanya hak cuti, ijin sakit, dll)". Perlu diketahui bahwa definisi ini dibuat untuk konsep pekerjaan dan bukan untuk tenaga kerja karena setiap orang dapat secara bersamaan memiliki dua pekerjaan atau lebih.

Pekerjaan informal dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua: (1) berusaha sendiri informal dan (2) pekerja upahan informal yang dipekerjakan di usaha formal atau informal yang mencakup karyawan tanpa kontrak resmi, tanpa jaminan ketenagakerjaan atau perlindungan sosial. Adapun yang termasuk usaha sendiri informal adalah pengusaha pada sektor informal, berusaha sendiri pada usaha informal, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi/kemitraan produksi informal (Chen, 2006 seperti dikutip dalam Maligalig, dkk, 2008).





**Grafik 14. Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Kegiatan Formal dan Informal di Kota Bandung 2018-2020 (persen)**



Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat, 2020

Penduduk yang bekerja di Kota Bandung sebagai pekerja formal terlihat meningkat dari tahun 2018 ke 2019 namun terlihat menurun di tahun 2020. Pada tahun 2020 persentase pekerja formal di Kota Bandung mencapai 58,26 persen, menurun dibanding tahun 2019 yang sebesar 66,96 persen. Selain itu, persentase pekerja informal di Kota Bandung menunjukkan adanya penurunan dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Pada tahun 2018, persentase pekerja informal sebesar 35,47 persen. Nilai tersebut semakin menurun di tahun 2019 menjadi 34,55 persen dan menurun lagi menjadi 33,04 persen di tahun 2020. Penurunan ini terkait dengan adanya pandemi Covid-19 tahun 2020 yang membuat masyarakat banyak kehilangan mata pencaharian terutama mereka yang bekerja di sektor pariwisata terkait dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat.



## Bab VI PERUMAHAN

Menurut Undang-Undang no 4 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, serta pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa. Rumah sendiri memiliki arti sebagai tempat untuk melepas lelah, beristirahat setelah penat melaksanakan kewajiban sehari-hari, sebagai tempat bergaul dengan keluarga, sebagai tempat untuk melindungi diri dari bahaya, sebagai tempat menyimpan kekayaan (Azwar,1996).

Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok disamping kebutuhan pangan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu keadaan perumahan dan lingkungannya dapat memberikan gambaran mengenai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Berbagai fasilitas yang mencerminkan kesejahteraan rumah tangga diantaranya dapat dilihat dari kualitas material yang mencakup jenis atap, dinding, dan lantai terluas yang digunakan. Untuk melihat bagaimana kondisi suatu rumah dapat dilihat dari luas lantai yang cukup memadai sehingga dapat memberikan kenyamanan serta udara Segar bagi pemiliknya. Di samping itu dilihat pula fasilitas lain yang berkaitan dengan sarana kesehatan seperti sumber air minum, jamban/kaskus, serta sumber penerangan yang digunakan.

Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.



## 6.1. Kualitas Rumah Tinggal

Menurut Departemen Kesehatan RI, rumah sehat merupakan bangunan tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan yaitu rumah yang memiliki jamban yang sehat, sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi yang baik, kepadatan hunian rumah yang sesuai dan lantai rumah yang tidak terbuat dari tanah. Sehingga dapat dikatakan bahwa rumah sehat adalah bangunan tempat berlindung dan beristirahat yang menumbuhkan kehidupan sehat secara fisik, mental dan sosial sehingga seluruh anggota keluarga dapat memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

Ada beberapa kriteria rumah tinggal yang harus dipenuhi sehingga dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal. Kriteria tersebut diantaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah.

**Tabel 14. Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kota Bandung 2019 -2020 (Persen)**

Indikator	2019	2020
(1)	(3)	(4)
Atap beton, genteng, sirap, seng dan asbes	98,36	97,48
Dinding terluas tembok dan kayu	98,31	100,00
Rata-rata luas lantai per kapita $\geq 10$ m <sup>2</sup>	59,84	59,79

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Jawa Barat, 2019-2020

Berdasarkan hasil Susenas 2020, sebagian besar rumah di Kota Bandung telah beratap beton, genteng, sirap, seng dan asbes. Demikian pula dengan dinding rumah, keseluruhan rumah tangga di Kota Bandung telah berdidinding terluas tembok. Namun demikian masih terdapat rumah dengan atap bukan beton, genteng, sirap, seng dan asbes.



Rumah tangga ini perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan kualitas hunian mereka.

Berkaitan dengan rumah sehat, WHO (Badan Kesehatan Dunia) merekomendasikan salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m<sup>2</sup>. Selanjutnya menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan rumah sehat jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8 m<sup>2</sup> oleh karena data hasil susenas tahun 2020 menunjukkan bahwa di Kota Bandung mengalami penurunan rata rata luas lantai perkapita dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2020 terdapat 59,79 persen rumah tangga yang memiliki luas lantai per kapita diatas 10 m<sup>2</sup>, menurun dari tahun 2019 yang sebesar 59,84 persen.

Semakin kecilnya luas lantai per kapita pada sebuah rumah tangga menunjukkan bahwa luas rumah yang ditempati tidak sebanding dengan banyaknya orang yang menghuni rumah tinggal tersebut. Hal ini mengindikasikan pula terdapat rumah tangga di Kota Bandung yang belum mampu untuk memiliki hunian dengan luas per kapita yang sesuai dengan rekomendasi kesehatan.

## 6.2. Fasilitas Rumah Tinggal

Kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman adalah kondisi fisik, kimia, dan biologis di dalam rumah, di lingkungan rumah dan perumahan, sehingga memungkinkan penghuni mendapatkan derajat kesehatan yang optimal. Persyaratan kesehatan perumahan dan pemukiman serta persyaratan rumah itu sendiri sangat diperlukan karena pembangunan perumahan berpengaruh sangat besar terhadap peningkatan derajat kesehatan individu, keluarga dan masyarakat (Sanropie, 1992).

Adapun persyaratan kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman menurut Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) no 829/Menkes/SK/VII/1999 sebagai berikut: lokasi tanah atau bangunan, kualitas udara, kualitas tanah, prasarana dan sarana



lingkungan, vektor penyakit, penghijauan, bahan bangunan, komponen dan penataan ruangan, pencahayaan, kualitas udara, penyediaan air dan pembuangan limbah. Penyediaan air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

**Tabel 15. Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kota Bandung 2018-2020 (persen)**

Indikator Kualitas Perumahan	Tahun	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Air Kemasan, isi ulang dan air Ledeng	89,34	83,04
Air Minum Bersih	94,89	90,23
Jamban Sendiri	75,18	77,42
Jamban Sendiri dengan tangki septik	41,56	41,80
Sumber Penerangan Listrik PLN	98,87	99,73

*Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat 2019-2020*

Berdasarkan hasil Susenas 2020 tercatat rumah tangga yang menggunakan air kemasan, isi ulang dan air ledeng sebagai sumber air minum di Kota Bandung adalah sebanyak 83,04 persen. Ini memperlihatkan adanya penurunan dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 89,34 persen. Selain itu tercatat 90,23 persen rumah tangga di Kota Bandung telah menggunakan air minum bersih.

Untuk penggunaan jamban, terdapat 77,42 persen rumah tangga telah menggunakan jamban sendiri sedangkan masih ada yang menggunakan jamban bersama (20,32%), MCK (2,26%), namun sudah tidak ada yang menggunakan jamban ketika buang air besar.



UNICEF menyatakan bahwa sanitasi dan perilaku kebersihan yang buruk, serta minum air yang tidak aman berkontribusi terhadap 88% kematian anak akibat diare di seluruh dunia (Kemenkes RI) dari semua kematian yang berakar pada buruknya kualitas air dan sanitasi, diare merupakan penyebab kematian terbesar.

Perlu diperhatikan bahwa rumah tangga yang menggunakan tangki septik sebagai pembuangan akhir tinja hanya meliputi 41,80 persen dari seluruh rumah tangga di Kota Bandung. 12,78 persen sisanya menggunakan SPAL, dan selebihnya yaitu 44,82 persen rumah tangga menggunakan sungai sebagai tempat pembuangan akhir tinjanya. Hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat pencemaran sungai di Kota Bandung.

Fasilitas perumahan lain yang tak kalah penting adalah listrik. Listrik telah menjadi kebutuhan utama rumah tangga. Dalam hal ini, hampir seluruh rumah tangga di Kota Bandung menggunakan PLN sebagai sumber penerangan utama.

### 6.3. Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang. Semakin banyak rumah tangga yang menempati rumah tinggal milik sendiri, maka semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.





**Tabel 16. Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tangga di Kota Bandung 2019-2020 (persen)**

Indikator	2019	2020
(1)	(3)	(4)
Milik sendiri	53,80	51,72
Lainnya	46,20	48,28

*Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, 2019-2020*

Berdasarkan hasil Susenas 2020, bahwa rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri di Kota Bandung adalah sebesar 51,72 persen. Sedangkan sisanya menempati rumah dengan status kontrak, rumah dinas, bebas sewa ataupun status kepemilikan lainnya. Meningkatnya persentase rumah tangga dengan cara selain milik sendiri dapat dikarenakan sebagian dari mereka menetap hanya untuk sementara, seperti karena tugas pekerjaan, kuliah/sekolah, ataupun yang lainnya. Namun ada juga yang memang karena kondisi ekonomi yang belum mapan untuk memiliki rumah sendiri dan juga harga rumah yang cukup mahal di ibukota Jawa Barat ini, sehingga mereka memilih untuk kontrak/sewa.



## BAB VII TARAF DAN POLA KONSUMSI

Pola konsumsi adalah suatu cara atau usaha untuk melakukan kegiatan konsumsi. Pola konsumsi bisa diartikan sebagai jumlah persentase dari distribusi pendapatan terhadap masing-masing pengeluaran pangan, sandang, jasa-jasa serta rekreasi dan hiburan. Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut.

Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

### 7.1. Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dibedakan atas dua jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran untuk makanan (pangan) dan pengeluaran non makanan (non pangan). Pengeluaran rumah tangga sering digunakan sebagai proksi dari pendapatan rumah tangga. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan



atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

**Tabel 17. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Bandung, 2018-2020**

Jenis Pengeluaran	Nominal (Rp.)			Persentase (%)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Padi-padian	58.052	60.242	63.215	2,99	3,05	3.23
2. Umbi-umbian	6.287	7.796	7.565	0,32	0,39	0.39
3. Ikan	38.413	45.404	42.795	1,98	2,30	2.18
4. Daging	47.131	48.806	54.315	2,42	2,47	2.77
5. Telur dan Susu	47.101	47.734	54.348	2,42	2,42	2.77
6. Sayur-sayuran	39.624	40.701	45.214	2,04	2,06	2.31
7. Kacang-kacangan	14.934	16.064	17.383	0,77	0,81	0.89
8. Buah-buahan	42.879	37.472	43.615	2,21	1,90	2.23
9. Minyak dan lemak	12.306	13.891	14.598	0,63	0,70	0.75
10. Bahan minuman	21.149	22.301	23.888	1,09	1,13	1.22
11. Bumbu-bumbuan	12.792	13.829	15.149	0,66	0,70	0.77
12. Konsumsi lainnya	14.345	13.774	15.942	0,74	0,70	0.81
13. Makanan dan minuman jadi	334.017	316.492	349.286	17,18	16,03	17.83
14. Tembakau dan sirih	75.616	85.352	78.066	3,89	4,32	3.99
<b>Makanan</b>	<b>764.646</b>	<b>769.859</b>	<b>825.379</b>	<b>39,34</b>	<b>38,99</b>	<b>42.14</b>
1. Perumahan	577.132	630.298	570.016	29,69	31,92	29.10
2. Barang dan jasa	289.606	312.500	284.975	14,90	15,83	14.55
3. Pakaian	65.069	56.467	54.553	3,35	2,86	2.78
4. Barang tahan lama	133.833	90.126	107.348	6,89	4,56	5.48
5. Pajak	58.752	63.264	60.325	3,02	3,20	3.08
6. Lainnya	54.737	51.825	56.245	2,82	2,62	2.87
<b>Bukan Makanan</b>	<b>1.179.128</b>	<b>1.204.480</b>	<b>1.133.462</b>	<b>60,66</b>	<b>61,01</b>	<b>57.86</b>
<b>Jumlah</b>	<b>1.943.775</b>	<b>1.974.339</b>	<b>1.958.841</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100.00</b>

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, 2018-2020

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan di Kota Bandung pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.958.841,- yang terdiri dari pengeluaran makanan sebesar Rp 825.379,- dan Rp. 1.133.462,-,- untuk pengeluaran bukan makanan. Pengeluaran per kapita penduduk



Kota Bandung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pengeluaran tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 15.498,-. Padahal, tahun sebelumnya pengeluaran selalu mengalami kenaikan seperti pada tahun 2019 pengeluaran yang terjadi sebesar Rp 25.352,-.

Pada tahun 2020, pengeluaran makanan mencakup 42,14 persen dari seluruh pengeluaran konsumsi penduduk Kota Bandung. Persentase ini relatif meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran makanan penduduk Kota Bandung tahun 2019 adalah sebesar 38,99 persen. Pada tahun 2018 ke 2019 jumlah pengeluaran makanan justru mengalami penurunan dari 39,4 persen menjadi 38,99 persen. Hal yang berbeda terjadi pada pengeluaran bukan makanan yang justru mengalami penurunan pada tahun 2019 ke tahun 2020. Pengeluaran bukan makanan tahun 2019 yaitu sebesar 61,01 persen. Jumlah tersebut menurun di tahun 2020 menjadi sebesar 57,86 persen. Pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 ke 2019, persentase pengeluaran non makanan justru meningkat dari 60,66 persen menjadi 61,01 persen.

Pengeluaran sub kelompok makanan penduduk Kota Bandung untuk jenis makanan dan minuman jadi merupakan porsi tertinggi dibandingkan dengan jenis makanan lainnya, yaitu sebesar 17,83 persen pada tahun 2020. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 16,03 persen. Pada tahun 2018 ke 2019 jumlah ini justru mengalami penurunan dari 17,18 persen menjadi 16,03 persen.

Pengeluaran sub kelompok tembakau dan sirih merupakan pengeluaran konsumsi terbesar kedua di antara sub kelompok makanan lainnya. Pada tahun 2019, persentase pengeluaran tembakau dan sirih mencakup 3,99 persen dari seluruh pengeluaran konsumsi penduduk Kota Bandung. Persentase ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 4,32 persen.

Pengeluaran kelompok ketiga terbesar adalah pengeluaran sub kelompok padi-padian. Pada tahun 2020, pengeluaran padi-padian mencapai 3,23 persen dari seluruh pengeluaran konsumsi penduduk di Kota Bandung. Pengeluaran sub kelompok padi-





padian mengalami kenaikan setiap tahunnya sejak tahun 2018 hingga tahun 2020. Pada tahun 2018 pengeluaran sub kelompok ini tercatat sebesar 2,99 persen, kemudian menjadi 3,05 persen di tahun 2019 dan kembali naik di tahun 2020.

Dalam waktu tiga tahun terakhir, pengeluaran bukan makanan didominasi oleh pengeluaran sub kelompok perumahan. Sub kelompok ini terdiri dari pengeluaran kontrak/sewa rumah, pemeliharaan rumah, biaya listrik, biaya air, biaya kendaraan bermotor, bahan bakar, dan biaya pos telekomunikasi. Persentase pengeluaran sub kelompok ini mengalami kenaikan persentase pada tahun 2018 ke tahun 2019, yaitu 29,69 persen pada tahun 2018, dan 31,92 persen pada tahun 2019. Lalu persentase ini mengalami penurunan menjadi 29,10 persen di tahun 2020.

Pengeluaran sub kelompok barang dan jasa merupakan pengeluaran non makanan terbesar kedua. Pada tahun 2020 persentase pengeluaran kelompok ini mencapai 14,55 persen, turun dari persentase di tahun 2019 yang sebesar 14,55 persen. Pengeluaran sub kelompok ini di antaranya terdiri dari pengeluaran alat kebersihan pribadi dan lingkungan, pengeluaran kesehatan, biaya pendidikan, biaya hiburan, dan lainnya.

Pengeluaran konsumsi dapat pula dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran rumah tangga. Berdasarkan pengeluarannya, rumah tangga dibagi menjadi 40 persen pengeluaran terbawah, 40 persen pengeluaran tengah dan 20 persen pengeluaran teratas. Pola konsumsi untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga memiliki pola yang berbeda.

Rumah tangga dengan pengeluaran 40 persen terbawah membelanjakan 60,72 persen pengeluarannya untuk pengeluaran makanan. Semakin tinggi pengeluaran rumah tangga maka semakin kecil proporsi pengeluaran makannan. Kelompok pengeluaran 40 persen tengah mengeluarkan 57,73 persen pengeluarannya untuk makanan. Sedangkan kelompok pengeluaran 20 persen teratas hanya mengeluarkan 30,97 persen untuk pengeluaran makanan.

Secara umum, kelompok makanan jadi merupakan pengeluaran konsumsi terbesar di semua kelompok rumah tangga. Namun rumah tangga dengan pengeluaran 40



persen terbawah merupakan kelompok rumah tangga terbesar yang mengkonsumsi makanan/minuman jadi . Semakin tinggi pengeluaran di rumah tangga, maka persentase mengkonsumsi makanan jadi semakin kecil. Rumah tangga dengan pengeluaran 40 persen terbawah memiliki pengeluaran makanan/minuman jadi sebesar 21,52 persen. Sedangkan rumah tangga dengan pengeluaran 40 persen tengah membelanjakan 20,53 persen dari pengeluarannya untuk makan dan minuman jadi. Persentase di kelompok 20 persen teratas lebih kecil lagi, yaitu 14,39 persen.

**Tabel 18 Rata-rata Persentase Pengeluaran Makanan per Kapita per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran dan Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga Di Kota Bandung 2020**

Jenis Pengeluaran (1)	Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga		
	40 persen terbawah (2)	40 persen tengah (3)	20 persen atas (4)
1. Padi-padian	6.35	3.86	1.63
2. Umbi-umbian	0.65	0.41	0.27
3. Ikan	3.10	2.37	1.72
4. Daging	3.75	3.15	2.13
5. Telur dan Susu	3.37	3.34	2.11
6. Sayur-sayuran	3.70	2.73	1.48
7. Kacang-kacangan	1.58	1.05	0.51
8. Buah-buahan	2.05	2.47	2.10
9. Minyak dan lemak	1.32	0.86	0.45
10. Bahan minuman	2.05	1.42	0.77
11. Bumbu-bumbuan	1.15	0.89	0.55
12. Konsumsi lainnya	1.27	1.04	0.47
13. Makanan dan minuman jadi	21.52	20.53	14.39
14. Tembakau dan sirih	5.87	5.17	2.38
<b>Makanan</b>	<b>57.73</b>	<b>49.30</b>	<b>30.97</b>

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, 2020





Pengeluaran tembakau dan sirih per kapita merupakan pengeluaran terbesar kedua di seluruh kelompok dengan pengeluaran terbesar adalah kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yaitu mencapai 5,87 persen. Semakin tinggi kelompok pengeluaran, maka pengeluaran untuk tembakau dan sirih semakin kecil. Demikian pula dengan pengeluaran per kapita untuk padi-padian yang sebesar 6,35 persen merupakan pengeluaran terbesar ketiga di kelompok pengeluaran 40 persen terbawah dan terbesar dibandingkan dua kelompok pengeluaran lainnya dan semakin mengecil dengan naiknya pengeluaran.

Pengeluaran sub kelompok makanan di pengeluaran 20 persen teratas sedikit berbeda dengan dua kelompok pengeluaran lainnya. Pengeluaran daging adalah pengeluaran terbesar ketiga di kelompok pengeluaran 20 persen teratas. Sedangkan pengeluaran ketiga terbesar di dua kelompok lainnya adalah padi-padian. Di kelompok 20 persen teratas, pengeluaran untuk padi-padian hanya sebesar 1,63 persen, lebih kecil dari pada pengeluaran daging, telur, ikan dan buah yang sebesar 2,13 persen.

Sedangkan pengeluaran bukan makanan sebagian besar dilakukan oleh kelompok pengeluaran 20 persen teratas. Cakupan pengeluaran bukan makanan untuk kelompok tersebut mencapai 69,03 persen. Sedangkan untuk kelompok 40 persen tengah sebesar 50,70 persen dan untuk pengeluaran 40 persen terbawah sebesar 42,27 persen. Kelompok 20 persen teratas memiliki persentase terbesar untuk seluruh komponen pengeluaran bukan makanan dibanding dua kelompok pengeluaran lainnya.



Tabel 19. Rata-rata Pengeluaran Non Makanan Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Bandung, 2020 (Rupiah)

Jenis Pengeluaran	Persentase (%)		
	40 persen terbawah	40 persen tengah	20 persen atas
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Perumahan	25.70	28.87	30.48
2. Barang dan jasa	9.71	12.51	17.87
3. Pakaian	2.56	2.72	2.92
4. Barang tahan lama	1.47	2.56	9.21
5. Pajak	2.42	2.87	3.48
6. Lainnya	0.41	1.18	5.08
Bukan Makanan	<b>42.27</b>	<b>50.70</b>	<b>69.03</b>
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, 2020

Barang dan Jasa merupakan komponen pengeluaran terbesar kedua untuk seluruh kelompok pengeluaran. Persentase pengeluaran barang dan jasa di kelompok 20 persen teratas hampir dua kali lebih besar dari pengeluaran barang dan jasa di kelompok pengeluaran 40 persen terbawah. Perbedaan juga ditunjukkan di komponen barang tahan lama. Pengeluaran barang tahan lama di kelompok 20 persen teratas mencapai nilai 9,21 persen sementara kelompok 40 persen terbawah hanya 1,47 persen.

Pengeluaran pakaian tidak terlalu berbeda antar kelompok pengeluaran. Kelompok 40 persen terbawah membelanjakan 2,56 persen pengeluarannya untuk pakaian dan perlengkapannya. Pengeluaran pakaian di kelompok pengeluaran 40 persen tengah adalah sebesar 2,72 persen, dan pengeluaran di kelompok 20 persen teratas adalah sebesar 2,92 persen.

## 7.2. Konsumsi Energi dan Protein

Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan



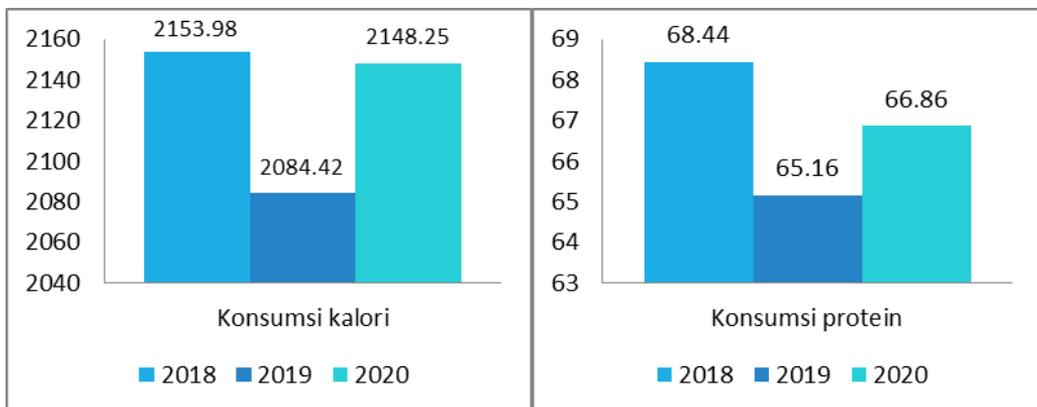


penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut.

Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2012) rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2150 kkal dan 57 gram protein.

Rata-rata konsumsi kalori dan protein penduduk Kota Bandung per kapita per hari cenderung mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 rata-rata konsumsi kalori penduduk Kota Bandung per hari sebesar 2.148,25 kkal, naik dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 2.084,42 kkal. Sedangkan konsumsi protein per hari adalah 66,86 gram, naik dari konsumsi di tahun 2019 yang sebesar 65,16 gram. Jumlah konsumsi kalori dan protein ini meningkat, padahal tahun sebelumnya dari tahun 2018 ke 2019 jumlah konsumsi ini sempat mengalami penurunan.

**Grafik 15. Rata-rata Konsumsi Kalori (Kkal) dan Protein (gram) Per Kapita Sehari di Kota Bandung, 2018-2020**



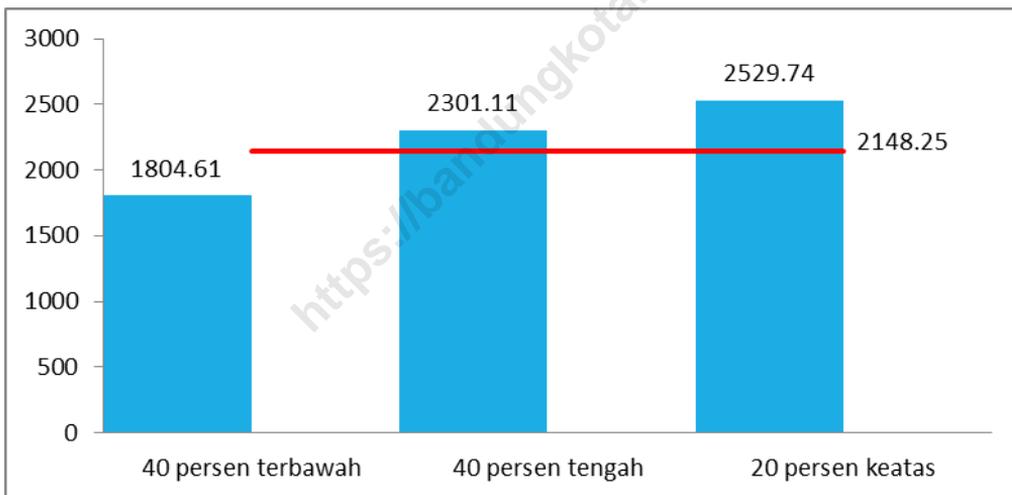
Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, 2018-2020

## Taraf dan Pola Konsumsi



Di tahun 2020, rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari untuk kelompok pengeluaran 40 persen terbawah adalah 1.804,61 kkal. Konsumsi ini merupakan konsumsi paling kecil dibandingkan dua kelompok lainnya. Rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari untuk kelompok pengeluaran 40 persen tengah dan 20 persen atas adalah 2.301,11 kkal dan 2.529,74 kkal. Jika dibandingkan dengan rata-rata konsumsi kalori per kapita per hari Kota Bandung, rata-rata konsumsi kalori kelompok pengeluaran 40 persen terbawah berada di bawah rata-rata Kota Bandung. Sedangkan rata-rata konsumsi kalori per kapita per harinya untuk dua kelompok pengeluaran lainnya berada di atas rata-rata konsumsi Kota Bandung.

**Grafik 16. Rata-rata Konsumsi Kalori Per Kapita Sehari Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Bandung, 2020 (Kkal)**



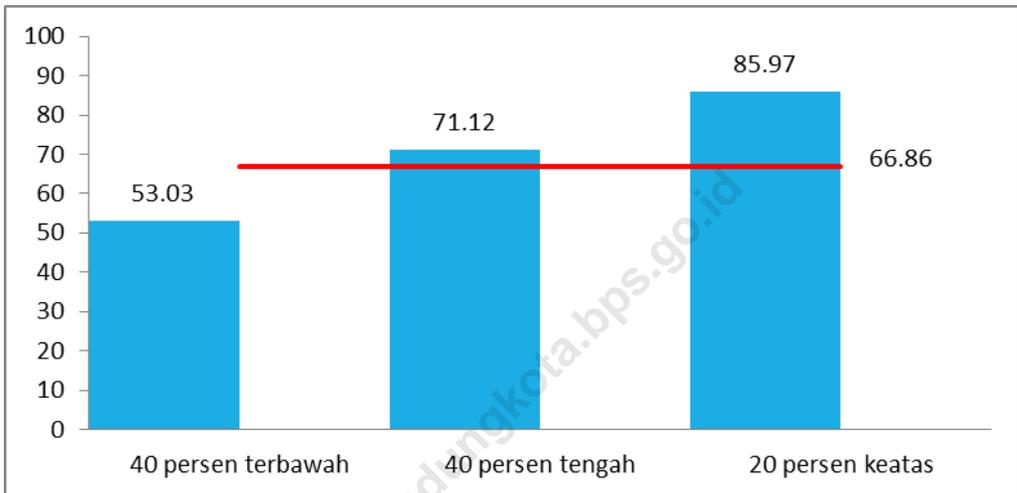
*Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, 2020*

Pada tahun 2020, rata-rata konsumsi protein per kapita per harinya juga berbeda antar kelompok pengeluaran. Sama seperti konsumsi kalori, rumah tangga dengan pengeluaran 40 persen terbawah mengkonsumsi protein paling sedikit dibandingkan dengan kelompok pengeluaran lainnya. Rata-rata konsumsi protein per kapita per harinya di kelompok pengeluaran 40 persen terbawah adalah 53,03 gram, lebih rendah dari rata-rata



konsumsi protein Kota Bandung yang sebesar 66,86 gram. Rumah tangga dengan pengeluaran 20 persen teratas mengkonsumsi protein paling tinggi yaitu 85,97 gram per kapita per harinya. Baik kelompok pengeluaran 40 persen tengah dan 20 persen atas, rata-rata konsumsinya berada di atas rata-rata konsumsi protein Kota Bandung.

**Grafik 17. Rata-rata Konsumsi Protein Per Kapita Sehari di Kota Bandung, 2020 (Gram)**



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, 2020

Jika dibandingkan dengan kecukupan akan energi dan protein yang disyaratkan oleh Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi, di mana energi yang diperlukan oleh tubuh manusia adalah 2.100 kkal per kapita per hari dan kebutuhan protein adalah 57 gram per kapita per hari, maka terdapat kondisi yang berbeda antara konsumsi kalori protein dan kalori penduduk Kota Bandung. Secara umum, penduduk Kota Bandung mengkonsumsi kalori lebih kecil daripada yang direkomendasikan oleh Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi. Sedangkan konsumsi protein, secara rata-rata telah memenuhi rekomendasi sebesar 57 gram per harinya. Rumah tangga dengan pengeluaran 40 persen terbawah mengkonsumsi kalori dan protein di bawah rekomendasi yang diberikan. Hal ini menunjukkan masih adanya ketimpangan dalam mendapatkan kalori dan protein di masyarakat. Kurangnya kalori dan protein akan berpengaruh terhadap kesehatan dan kualitas dari penduduk.



## BAB VIII SOSIAL LAINNYA

Indikator kesejahteraan masyarakat lainnya di antaranya adalah akses masyarakat terhadap informasi dan komunikasi, akses masyarakat terhadap layanan usaha, perjalanan wisata dan tingkat keamanan wilayah. Dalam bab ini akan di bahas mengenai akses informasi dan komunikasi serta akses kredit.

Perkembangan teknologi menjadi hal yang tak terpisahkan dalam kehidupan masa kini. Berbagai layanan masyarakat seperti pun sudah beralih dari metode konvensional menjadi digital, seperti jual beli, layanan pembayaran, dan sebagainya. Era digital menjadikan media sosial menjadi ajang sosialisasi dengan dunia luar.

Akses pada teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi indikator yang dapat mengukur kesejahteraan masyarakat. Gaya hidup modern memicu kebutuhan akan informasi dan komunikasi yang didapat melalui peralatan komunikasi seperti telepon selular pintar (*smartphone*) dan komputer. Harga telepon pintar (*smartphone*) yang semakin terjangkau dan semakin luasnya cakupan wilayah jangkauan frekuensi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data internet semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses segala informasi.

### 8.1 Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi sangat berkembang di Kota Bandung. Kontribusi lapangan usaha Informasi dan Teknologi pada perekonomian naik di tahun 2019 menjadi 14,22 persen. Pada tahun 2019 nilai tambah lapangan usaha ini mencapai 40.322 miliar rupiah.

Alat yang sering digunakan untuk mengakses informasi dan komunikasi adalah telepon selular dan laptop. Pada tahun 2020 di Kota Bandung tercatat 85,87 persen anggota rumah tangga berusia 5 tahun ke atas menggunakan telepon seluler/nirkabel/computer/laptop. Rata-rata persentase penggunaan alat teknologi





informasi tersebut pada anggota rumah tangga berusia 5 tahun ke atas di Kota Bandung adalah 85,87 persen. Anggota rumah tangga laki laki lebih banyak menggunakannya disbanding anggota rumah tangga perempuan, yaitu 85,96 persen untuk anggota rumah tangga laki-laki dan 85,26 persen untuk penduduk perempuan.

Akses internet di Kota Bandung cukup tinggi. Dari data Susenas 2020 diketahui bahwa akses internet dilakukan oleh 76,73 persen anggota rumah tangga usia 5 tahun ke atas. Persentase ini meningkat dibandingkan persentase akses internet di tahun 2019 yang sebesar 72,82. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Bandung sudah terbiasa dengan internet.

**Tabel 20 Persentase Anggota Rumah Tangga 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet 3 Bulan Terakhir Menurut Karakteristik di Kota Bandung, 2019-2020**

Kelompok Pengeluaran	Akses Internet	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Kuintil Pengeluaran		
40 persen terbawah	63,60	67,09
40 persen tengah	74,15	80,46
20 persen atas	87,54	87,60
Pendidikan Tertinggi ART		
SD ke bawah	43,05	49,95
SMP ke atas	87,76	90,63
Kota Bandung	72,82	76,73

*Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung 2019-2020*

Jika dilihat berdasarkan pengeluarannya, seluruh penduduk usia 5 tahun ke atas di semua kelompok pengeluaran mengalami kenaikan persentase. Kenaikan terbesar berada di kelompok 40 persen tengah. Pada tahun 2020, persentase anggota rumah tangga di kelompok pengeluaran 40 persen tengah yang mengakses internet mencapai 80,46 persen, naik dari persentase 2019 yang sebesar 74,15 persen.



Anggota rumah tangga yang termasuk 20 persen teratas mengakses internet terbesar dibandingkan dua kelompok lainnya. Pada tahun 2020, akses internet yang dilakukan oleh anggota rumah tangga dengan pengeluaran tersebut mencapai 87,60 persen, di atas rata-rata Kota Bandung yang sebesar 76,73 persen.

Anggota rumah tangga yang berusia 5 tahun ke atas yang berpendidikan SD ke bawah mengakses internet lebih sedikit daripada anggota rumah tangga yang berpendidikan SMP ke atas, yaitu sebesar 49,95 persen. Persentase ini jauh lebih kecil dari anggota rumah tangga yang pendidikan SMP ke atas yang sebesar 90,63 persen. Namun demikian, anggota rumah tangga di kedua kelompok tersebut mengalami peningkatan akses internet dibandingkan dengan tahun 2018.

## 8.2 Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial merupakan hal penting di masyarakat, Keberadaan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar menjadikan perlindungan sosial masih diperlukan. Dalam undang-undang no 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa perlindungan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani guncangan dan kerentanan sosial. Pemberdayaan diarahkan adar masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya.

Perlindungan sosial merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Beberapa bentuk perlindungan sosial yang disediakan oleh pemerintah di antaranya adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program Keluarga Harapan (PKH).

BNPT adalah bantuan sosial dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme perbankan. KPM akan menerima kit bantuan non tunai berupa kupon elektronik (e-





voucher) dari Bank Penyalur yang dapat digunakan KPM untuk membeli beras di e-waroeng.

Program perlindungan sosial juga mencakup bidang pendidikan. Bantuan diberikan dalam bentuk Program Indonesia Pintar (PIP) yaitu bantuan tunai kepada anak usia sekolah (usia 6 -21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin. PIP merupakan bagian dari penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan upaya memberi perlindungan sosial kepada keluarga miskin. Sasaran PKH adalah Keluarga Miskin (KM) berdasarkan Basis Data Terpadu. Peserta PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat.

**Tabel 21. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Program Perlindungan Sosial Yang Diterima di Kota Bandung, 2019-2020 (Persen)**

Jenis Program Perlindungan Sosial	Persentase Rumah Tangga Yang Menerima	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Raskin/Rastra/BNPT	5,21	4,11
Program Indonesia Pintar (PIP)	4,41	4,70
Kartu Perlindungan Sosial (KPS) / Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	5,41	4,55
Program Keluarga Harapan (PKH)	3,83	3,65

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, 2019-2020

Dari data Susenas diketahui bahwa keluarga miskin di Kota Bandung mendapatkan perlindungan sosial berupa berbagai macam bentuk bantuan. Pada tahun 2020 Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) diterima oleh 4,11 persen rumah tangga di Kota Bandung. Persentase ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 5,21 persen.

Program Indonesia Pintar diterima oleh 4,70 persen rumah tangga di Kota Bandung. Persentase ini mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.



Pada tahun 2020, penerima bantuan KPS/KKS mencakup 4,55 persen dari rumah tangga di Kota Bandung. Persentase ini pun menunjukkan penurunan yang cukup besar dibanding persentase tahun sebelumnya yang sebesar 5,41 persen. Sedangkan bantuan program PKH diterima oleh 3,65 persen rumah tangga di Kota Bandung. Persentase rumah tangga penerima PKH di Kota Bandung sedikit mengalami penurunan dibanding tahun 2019 yang sebesar 3,83 persen.

Perlindungan sosial memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya perlindungan sosial, masyarakat kurang mampu akan memiliki akses yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian tidak ada satu warga masyarakat pun yang tidak mampu memenuhi keperluan dasar hidupnya.

<https://bandungkota.bps.go.id>



# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA BANDUNG**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 88 Bandung 40273  
Telp/ Fax : (022)7905-091  
Homepage : <http://www.bandung.gkstat.bps.go.id>  
Email : [ps273@bps.go.id](mailto:ps273@bps.go.id)

ISSN 2797-3646

